



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perkenannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti ini dapat kami susun, dimana ini merupakan kewajiban dari setiap OPD pada ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan kalangan lembaga Legislatif untuk melihat sejauh mana kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD disetiap daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta Pertanggungjawaban terhadap kinerja OPD selama melaksanakan pembangunan di daerah.

Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyampai kan LkjIP Tahun 2019 berdasarkan anggaran pada Tahun 2019 yang telah ditetapkan untuk menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian kami sampaikan laporan ini mudah mudahan menjadi data yang tepat didalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelaksanaan Kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya.

Terima kasih.

Selatpanjang, Januari 2020

KEPALA DPMD

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Drs. IKHWANI, M.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650314 199401 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan kepemimpinan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, disamping juga penyelenggaraan pemerintah daerah harus melaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditambah lagi mengutamakan implementasi teknis untuk mengikuti dan mengimplementasikan program-program yang menjadi prioritas daerah, dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur-unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan kesekretariatan, mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Bidang-bidang, perumusan, perencanaan program, evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Keuangan serta Administrasi Umum;
2. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengembangan Kelembagaan masyarakat yang meliputi kelembagaan masyarakat dan peningkatan SDM dan Ekonomi;
3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
4. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pemerintahan Desa yang meliputi Bidang kelembagaan dan Bidang Aparatur Desa.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
3. Bidang Usaha Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa;
4. Bidang Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Renstra, Visi dan Misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran dilakukan pelaksanaan strategi berbentuk Program dan Kegiatan.

Tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauhmana program dan kegiatan dapat di capai secara terukur menggunakan Indikator yang Realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan penetapan Kinerja Tahun 2019.

Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat-menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan alat tulis kantor;
- f. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyediaan makanan dan minuman;
- l. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/kunjungan;
- m. Penyediaan jasa keamanan kantor;
- n. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- c. Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dan Laporan Pertanggungjawaban;
 - b. Penyusunan Laporan Prognosis SKPD;
 - c. Penyusunan Dokumen SPIP.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Kegiatan :
 - a. Pendampingan dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa;
 - b. Pendampingan Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Provinsi Riau dan Tingkat Nasional;
 - d. Bimtek Penerapan TTG dan Posyantek dalam mewujudkan kewirausahaan.

6. Program Pengembangan Ekonomi Desa.
Kegiatan :
 - a. Monitoring dan Evaluasi BUMDes
 - b. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BUMDes Se Kabupaten;
 - c. Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes;
 - d. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa dalam Mejujudkan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi.

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan BBGRM Tingkat Kabupaten
 - b. Pelatihan Peningkatan Peran Kader POSYANDU

8. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan

Kegiatan :

- a. Pelatihan BPD Se Kabupaten
- b. Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan asset desa
- c. Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Sebagai Administrator Desa;
- d. Pemantapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- e. Rakor Penyusunan Penganggaran Desa;
- f. Pembinaan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa;
- g. Pelatihan Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja dan fungsi Kepala Desa;
- h. Bimbingan Teknis Pengoperasian aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa).

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa

- a. Peningkatan peran PKK;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas PMD	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	4
1.4. Isu Strategis	10
1.5. Landasan Hukum	11
1.6. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
1. Visi	15
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	36
2.3 Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	26
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan	120
BAB IV PENUTUP	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPMD	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Menengah DPMD	20
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Tahun 2019	21
2.4 Perjanjian Kinerja DPMD 2019	25
3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran DPMD Tahun 2019	27
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	29
3.3 Capaian Indikator Kinerja DPMD Tahun 2019	31
3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran DPMD Tahun 2019	32
3.5 Pencapaian Target Misi DPMD Tahun 2019	32
3.6 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2019	33
3.7 Daftar Nama-Nama Desa Kabupaten Kepulauan Meranti	35
3.8 Laporan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun 2019	40
3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019	44
3.10 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dan Tahun 2019	47
3.11 Rekapitulasi Desa dengan Pengelolaan APBDes Tahun 2018	48
3.12 Rekapitulasi Desa dengan Pengelolaan APBDes Tahun 2019	50
3.13 Data Laporan Waktu Penetapan dan Penyampaian APBDes 2018	53
3.14 Laporan Waktu Penetapan Perdes APBDes dan Penyampaian APBDes 2019	56
3.15 Data BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018	60
3.16 Data BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019	64
3.17 Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018	77
3.18 Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018	77
	80

3.19 Rekapitulasi Warung Teknologi / Posyantek Tahun 2018	82
3.20 Rekapitulasi Warung Teknologi / Posyantek Tahun 2019	84
3.21 Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1	88
3.22 Program, Kegiatan dan Anggaran dan Output yang dihasilkan sasaran 1	92
3.23 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1	97
3.24 Kategori Nilai IKM	98
3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	99
3.26 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dan Tahun 2019	100
3.27 Penghitungan Nilai IKM DPMD Tahun 2018	101
3.28 Penghitungan Nilai IKM DPMD Tahun 2019	103
3.29 Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2	105
3.30 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan Sasaran 2	108
3.31 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2	110
3.32 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2019	115
3.33 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2018	121
3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2019	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

- 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5
Tahun 2019

1.1. LATAR BELAKANG

Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan Pemerintahan yang baik (*Clean Government and Good Government*) serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi tujuan melaksanakan mandat publik secara efektif dan ekonomis, serta melaksanakan kebijakan pemerintah yang secara umum dapat meningkatkan kualitas hidup semua orang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Salah satu indikator efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

Dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Dalam rangka itu, diperlukanlah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan

dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Tentu saja hal ini harus selalu ditingkatkan dan didukung oleh pembenahan sistem manajemen kinerja yang tercermin dalam LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan secara optimal.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung didalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulat tertinggi. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan juga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dimana dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terlaksananya seluruh Visi-Misi Dinas PMD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah khususnya Misi ke-4 yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yaitu “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien”. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

1. Minimnya ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan aktual
2. Masih kurangnya tenaga yang ahli dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu program/kegiatan yang kurang memadai untuk menampung usulan program/kegiatan pada dokumen perencanaan tahunan, dan indikator kinerja yang sulit diukur.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh seorang Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang yang meliputi Sekretariat, bidang pengembangan kelembagaan masyarakat, bidang usaha pengembangan usaha ekonomi desa, serta bidang bidang pemerintahan desa.

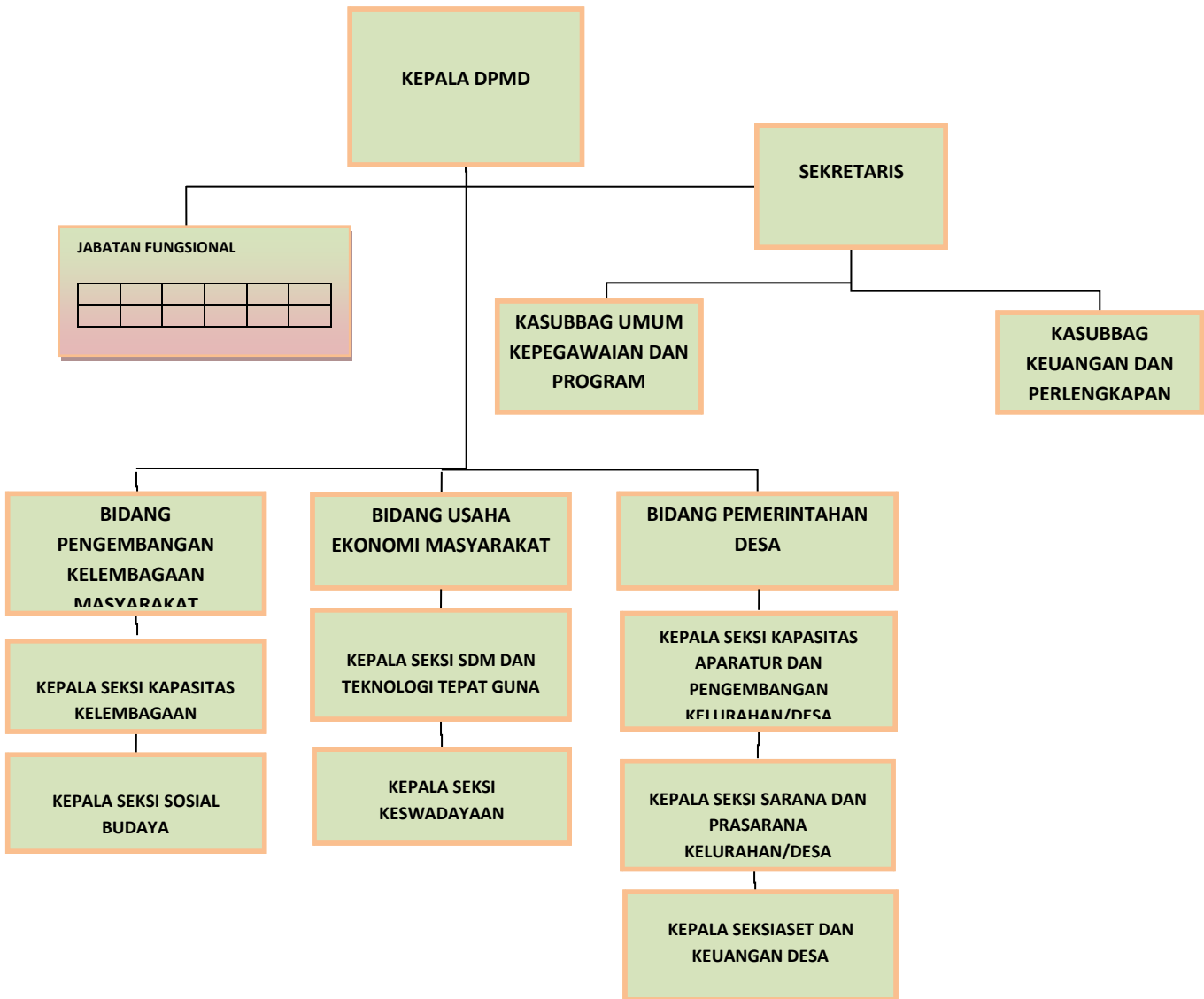
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur-unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
**Struktur Organisasi
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Kepulauan Meranti**



Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
3. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
4. Bidang Pemerintahan Desa.

Bagian dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang membawahi Sekretariat dan Kepala Seksi.

1. Bagian Sekretariat terdiri dari 2 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - 1.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 - 1.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:
 - 2.1. Seksi Kapasitas Kelembagaan;
 - 2.2. Seksi Sosial Budaya.
3. Bidang Usaha Pengembangan Usaha Ekonomi Desa terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:
 - 3.1 Seksi SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - 3.2 Seksi Pengembangan Permodalan dan Usaha Ekonomi Desa.
4. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:
 - 4.1 Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD;
 - 4.2 Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Pengembangan Desa;
 - 4.3 Seksi Aset dan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - a. sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
 - b. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian dibidang pengembangan Kelembagaan Masyarakat yang meliputi Kelembagaan Masyarakat dan Peningkatan SDA dan Ekonomi.
- (2) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. seksi kapasitas kelembagaan; dan
 - b. seksi sosial budaya;
- a. Seksi Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas Menyiapkan bahan bimbingan melakukan, bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis dibidang kapasitas Kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial Budaya.

2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas: melaksanakan pekerjaan dan pembinaan, pengembangan, pengendalian, koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat memfasilitasi kemitraan usaha permodalan kegiatan yang di arahkan kepedesaan, sebagai program masuk desa agar terpadu menjadi desa mandiri serta sinkronisasi usaha ekonomi masyarakat mempunyai produk unggulan berorientasi pasar.

- (2) Susunan Organisasi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:

- a. seksi SDA dan teknologi tepat guna; dan
- b. seksi pengembangan permodalan dan usaha ekonomi desa.

(1) Seksi SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi SDA dan teknologi tepat guna.

(2) Seksi Pengembangan Permodalan dan Usaha Ekonomi Desamempunyai tugas merencanakanoperasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan Permodalan dan Usaha Ekonomi Desa.

3. Bidang Pemerintahan Desa

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas bidang Pemerintahan Desa.

(2) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a. seksi peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD;
- b. seksi penataan administrasi dan evaluasi pengembangan desa; dan
- c. seksi aset dan keuangan desa.

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan tugas pada peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD.

(2) Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Pengembangan Desa mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan penataan administrasi dan evaluasi dalam rangka pengembangan desa;

(3) Seksi Aset dan Keuangan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kerja yang menangani urusan keuangan dan aset desa.

1.4. ISU STRATEGIS

Analisis isu – isu strategis merupakan gambaran kondisi yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga akan diperoleh gambaran secara utuh mengenai kondisi yang dihadapi terkait dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi rencana strategis ke depan melalui program sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran tahunan sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- c. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah kabupaten dalam pembinaan desa/kelurahan.
- d. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat jika di kelola dan diikutsertakan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan desa akan memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat positif terhadap proses pembangunan wilayah pedesaan.
- e. Berupaya meningkatkan koordinasi melalui komunikasi baik, vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011;
 17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 20016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun Anggaran 2019. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari Lima Bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan periode dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

**"MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU
DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI"**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 – 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1: Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur berbudaya melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
- Misi 2: Mewujudkan kawasan niaga;
- Misi 3: Meningkatkan Derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- Misi 4 : Mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efesien;
- Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah;
- Misi 6: Meningkatkan infrasturktur dasar dan optimalisasi penataan ruang
- Misi 7: Meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup .

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan Misi ke 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah yang bersih, efektif dan efisien.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menciptakan penataan birokrasi pemerintahan khususnya pemerintahan desa dengan mengadakan pelatihan, pembekalan, dan orientasi bagi aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan yang ada di desa.

- b. Pernyataan Misi ke 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah.

Pada misi kelima ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, hal ini diprogramkan oleh bidang usaha ekonomi masyarakat, peran BUMDes yang merupakan lembaga desa sangat berpengaruh dalam rangka meningkatkan Usaha Ekonomi Desa serta dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam membangun desa, selain itu juga untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian desa, yang menjadi program dan kegiatan yang dikedepankan adalah pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dimana yang menjadi program adalah pembentukan pusat pelayanan teknologi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti posyantek ini diharapkan bisa menghasilkan alat yang bisa mengolah sumber daya alam menjadi bahan jadi yang bisa meningkatkan hasil produksi. Selain untuk meningkatkan hasil produksi alat yang bisa mengolah sumber daya alam ini juga akan menjadi bahan pameran pada ajang lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi bahkan Tingkat Nasional, adapun TTG menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas PMD yang mampu

mendukung misi Kepala Daerah dalam bidang Ekonomi dikarenakan Indikator ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) dibawah Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG), dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa yang menerapkan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan SDA lokal dan lingkungan berkelanjutan, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 – 2019.

3. Tujuan dan Sasaran

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi tersebut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan Sumber Daya alam dan Potensi Daerah	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) 2. Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang Baik	1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

Sumber Data : Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti

3.2 Sasaran

Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Pada tahun 2020 Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama, hal ini didasarkan pada perubahan arah dan program kinerja Dinas PMD agar menjadi lebih fokus terhadap outcome atau manfaat terhadap sebuah program dan kegiatan yang dijalankan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(<i>Good Governance</i>)	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	90 %	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	70%	75%	80%	85%	90%	95%
					1.1 Tertib : Tertib aturan dan ketentuan	70%	75%	80%	85%	90%	95%
					1.2 Tepat waktu : Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	70%	75%	80%	85%	90%	95%
					2. Jumlah Desa yang memiliki Batas Desa					x	x
					3. Jumlah BUMDes yang meningkatkan PADes					x	x
		1.	2.	3.	4. Persentase Penataan Lembaga Kemasyarakatan aktif					x	x
					5. Jumlah Kelompok Posyantekdes yang terbentuk					x	x
2	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang Baik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	65%	70%	75%	80%	85%	90%

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
1	Meningkatnya Kualitas aparatur pemerintahan desa	1. Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu							
		a.	Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan	%	1. Berdasarkan UU Tentang Desa No 6 Tahun 2014, dan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Penjelasan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Tertib Aturan dan ketentuan berdasarkan <u>PERBUB</u> dalam penyusunan APBDes Jumlah Desa	X 100%	Dinas PMD	Penjelasan ada pada UU Tentang Desa No 6 Tahun 2014, dan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Penjelasan Keuangan Desa
		b.	Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu	%	2. Berdasarkan UU Tentang Desa No 6 Tahun 2014, dan Permendagri No 113	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penetapan Perdes			Penjelasan ada pada UU Tentang Desa No 6 Tahun 2014, dan Permendagri

			yang Ditentukan		Tahun 2014 Tentang Penjelasan Keuangan Desa	APBDes dan Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Jumlah Desa	X 100%	Dinas PMD	No 113 Tahun 2014 Tentang Penjelasan Keuangan Desa
			2. Jumlah Desa yang memiliki Batas Desa	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Batas Desa	Jumlah Desa yang memiliki batas tahun ini Jumlah keseluruhan Batas Desa yang akan dibentuk	X 100%	Dinas PMD	Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
			3. Jumlah BUMDES yang meningkatkan PADes	%	Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2017	Jumlah Bumdes yang meningkatkan PADes tahun ini Jumlah keseluruhan Bumdes	X 100 %	Dinas PMD	Yang termasuk lembaga desa adalah BUMDES yang fokus pada pengembangan perekonomian masyarakat desa
			4. Persentase Penataan Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif	X 100%	Dinas PMD	Yang termasuk lembaga kemasyarakatan terdiri dari 7 (Tujuh) Lembaga : LPMD, Posyandu, PKK, Karang Taruna, RT/RW,

					Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan			Lembaga Adat Desa, KPMD.
		5. Jumlah Kelompok Posyantekdes yang terbentuk	Kelompok	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Posyantekdes terbentuk	$\times 100\%$	Dinas PMD	Kelompok TTG yang Aktif di setiap Kecamatan (Gender)
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	6. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2004	$\frac{\text{Total Nilai Unsur Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi} \times (\text{kali}) \text{ Nilai Penimbang}}$	$\times 100\%$	Hasil Survey IKM	Hasil Survey IKM Kuesioner berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2004

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti

b. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	90 %
		1.1. Tertib : Tertib aturan dan ketentuan	90 %
		1.2. Tepat Waktu : Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	90 %
		2. Jumlah Desa yang memiliki Batas Desa	20 Desa
		3. Jumlah BUMDes yang meningkatkan PADes	xx
		4. Persentase Penataan Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85 %
		5. Jumlah Kelompok Posyantekdes yang terbentuk	xx
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	6. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pe]desaan	Rp. 123.000.000	APBD
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 250.000.000	APBD
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 121.800.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 599.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Rp. 402.300.000	APBD

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Prediket	Kode Warna
< 100 %	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai/sesuai Target	
>100 %	Melebihi Target	

Dan prediket capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100 %) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	Kategori	Rata-rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90%	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 - 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Berikut adalah sasaran-sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Enam (6) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN 1	Terdiri dari 5 indikator
SASARAN 2	Terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam hal ini pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	%	85 %	100 %	118 %
	a. Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan	%	85 %	100 %	118 %
	b. Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan	%	85 %	100 %	118 %
2	Jumlah Desa yang memiliki Batas Desa	Jumlah	20 Desa		
3	Jumlah BUMDes yang meningkatkan PADes	%	80 %		
4	Persentase Penataan Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80 %		
5	Jumlah Kelompok Posyantekdes yang terbentuk	%	9 Kelompok		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85 %	85 %	100 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Dari Tabel 3.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator **Pertama**, Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu, dengan capaian kinerja 118 %, dengan memiliki 2 (dua) sub indikator yaitu Pertama, Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan yang awal tahun 2018 memiliki target sebesar 85 %, untuk realisasinya sebesar 100 %, sehingga capaian yang didapat sebesar 118 %. Kedua, Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan, dengan target awal sebesar 85 % dan realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja yang didapati adalah sama sebesar 118 %. **Kedua**, Persentase Lembaga Desa aktif dengan capaian kinerja sebesar

121,1 % dari target 80 %, selanjutnya **Ketiga**, Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang ada di seluruh desa dalam hal ini peran dari PKK sudah berjalan dengan sangat baik. **Keempat**, Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG), dimana target awal yang ditentukan sebanyak 9 (sembilan) kelompok, sementara realisasi sebanyak 10 Kelompok, sehingga capaian Indikator Kinerja Utamanya sebesar 111,1 %.

- Capaian Kinerja yang memiliki target Tercapai/Sesuai Target ada pada Indikator Kinerja Utama (IKU) **Kelima**, Indeks Kepuasan Masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh DPMD selama Tahun 2019 berjalan sesuai capaian sebesar 100 %, dengan yang ditargetkan sebesar 80 %, untuk realisasi sebesar 80 %.

3.3 Pengukuran dan analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021 sebanyak 2 (dua) Sasaran.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	%	85 %	100 %	118 %
	1. Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan	%	85 %	100 %	118 %
	2. Tepat Waktu : Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	%	85 %	100 %	118 %
2	Persentase Lembaga Desa Aktif	%	80 %	96,88 %	121,1 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80 %	100 %	125 %
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kelompok	9	11	122,2 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80 %	80 %	100 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi / Melampaui Target	80 %
2	Sesuai Target	20 %
3	Tidak Mencapai Target	0 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :
Dari 5 (lima) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Target Misi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian								
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)				
			Jumlah	100 %	Jumlah	100 %	Jumlah	100 %			

1	Misi 4	2	2	100	0		0	
2	Misi 5	3	2	100	1	100	0	

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 4	2	
1	Melebihi/melampaui Target	2	100
2	Sesuai Target	0	100
3	Tidak Mencapai Target	0	
B.	Misi 5	3	100
1.	Melebihi/melampaui Target	2	100
2.	Sesuai Target	1	100
3.	Tidak Mencapai Target	0	

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja dari 1 (satu) misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa

Upaya untuk meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dimaknai sebagai cara yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBDes, dibarengi dengan tingkat kepatuhan untuk tertib aturan ketentuan dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan APBDes.

Pemilihan sasaran ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas aparatur desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut nama-nama Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti :

Tabel 3.7
Daftar Nama-Nama Desa Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA
1	TEBING TINGGI	1 DESA ALAH AIR
		2 DESA ALAH AIR TIMUR
		3 DESA BANGLAS
		4 DESA BANGLAS BARAT
		5 DESA SESAP
		6 KEL. SELATPANJANG KOTA
		7 KEL. SELATPANJANG TIMUR
		8 KEL. SELATPANJANG SELATAN
		9 KEL. SELATPANJANG BARAT
2	TEBING TINGGI BARAT	1 DESA ALAI
		2 DESA INSIT
		3 DESA TENAN
		4 DESA TANJUNG
		5 DESA TANJUNG PERANAP
		6 DESA MEKONG
		7 DESA BATANG MALAS
		8 DESA KUNDUR
		9 DESA MENGGIKIP
		10 DESA MANTIASA
		11 DESA GOGOK DARUSSALAM
		12 DESA ALAI SELATAN
		13 DESA MAINI DARUL AMAN
		14 DESA TANJUNG DARUL TAKZIM
3	TEBING TINGGI TIMUR	1 DESA LUKUN
		2 DESA SUNGAI TOHOR

	3	DESA KEPAU BARU
	4	DESA TELUK BUNTAL
	5	DESA NIPAH SENDANU
	6	DESA TANJUNG GADAI
	7	DESA TANJUNG SARI
	8	DESA BATIN SUIR
	9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT
	10	DESA SENDANU DARUL IHSAN
4		PULAU MERBAU
	1	DESA BARAN MELINTANG
	2	DESA RENAK DUNGUN
	3	DESA KUALA MERBAU
	4	DESA TANJUNG BUNGA
	5	DESA TELUK KETAPANG
	6	DESA CENTAI
	7	DESA SEMUKUT
	8	DESA PADANG KAMAL
	9	DESA PANGKALAN BALAI
	10	DESA BATANG MERANTI
	11	DESA KETAPANG PERMAI
5		MERBAU
	1	KEL. TELUK BELITUNG
	2	DESA TANJUNG KULIM
	3	DESA PELANTAI
	4	DESA LUKIT
	5	DESA BAGAN MELIBUR
	6	DESA MERANTI BUNTING
	7	DESA MEKAR SARI
	8	DESA MAYANG SARI
	9	DESA SUNGAI ANAK KAMAL
	10	DESA SUNGAI TENGAH
6		TASIK PUTRI PUYU
	1	DESA MENGGOPOT
	2	DESA MENGGIRAU
	3	DESA TANJUNG PADANG
	4	DESA BANDUL
	5	DESA KUDAP
	6	DESA SELAT AKAR
	7	DESA DEDAP
	8	DESA PUTRI PUYU
	9	DESA TANJUNG PISANG
	10	DESA MEKAR DELIMA
7		RANGSANG

	1	DESA TANJUNG SAMAK
	2	DESA TANJUNG BAKAU
	3	DESA TANJUNG MEDANG
	4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI
	5	DESA REPAN
	6	DESA PENYAGUN
	7	DESA GEMALA SARI
	8	DESA TELUK SAMAK
	9	DESA TOPANG
	10	DESA CITRA DAMAI
	11	DESA TEBUN
	12	DESA DWI TUNGGAL
	13	DESA TANJUNG GEMUK
	14	DESA WONOSARI
8		RANGSANG BARAT
	1	DESA BANTAR
	2	DESA SEGOMENG
	3	DESA ANAK SETATAH
	4	DESA LEMANG
	5	DESA BOKOR
	6	DESA SUNGAI CINA
	7	DESA MELAI
	8	DESA TELAGA BARU
	9	DESA BINA MAJU
	10	DESA SIALANG PASUNG
	11	DESA MEKAR BARU
	12	DESA PERMAI
9		RANGSANG PESISIR
	1	DESA KEDABU RAPAT
	2	DESA KAYU ARA
	3	DESA SONDE
	4	DESA SENDAUR
	5	DESA TANAH MERAH
	6	DESA BUNGUR
	7	DESA SOKOP
	8	DESA BETING
	9	DESA TELESUNG
	10	DESA TENGGAYUN RAYA
	11	DESA TANJUNG KEDABU

SumberData : Data Olahan Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti 2019

Indikator sasaran 1 yaitu Pertama, Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu memiliki dua Sub Indikator, *pertama*, Tertib : Tertib aturan dan Ketentuan, *kedua*, Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu yang ditentukan.

Sub indikator pertama, Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan, Dengan formulasi penghitungan yaitu jumlah seluruh desa yang tertib aturan dan ketentuan berdasarkan PERBUB dalam penyusunan APBDes dibagi dengan jumlah seluruh desa.

Pelaksanaan APBDes yang sesuai dengan **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 yang meliputi :**

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Prinsip penyusunan APBDes
3. Kebijakan Penyusunan APBDes
4. Teknis Penyusunan APBDes dan
5. Hal-hal khusus lainnya.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dijabarkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana sebelum Peraturan Desa Tentang APBDesa ini di terbitkan harus sebelumnya mendapat persetujuan dari pihak Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya ditetapkannya Peraturan Desa Tentang APBDes. Dapat dijelaskan bahwa skema dibawah ini merupakan barometer dalam pengukuran desa yang Tertib aturan dan ketentuan dalam pengelolaan APBDes.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1

Skema AturanPengelolaan APBDes



Sumber : Perbup APBDes Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari Gambar 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Skema Aturan Pengelolaan APBDes Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 dengan pendataan seluruh desa yang ada di kabupaten kepulauan meranti bisa dikatakan bahwa seluruh desa tertib aturan dan ketentuan dalam penyusunan APBDes, dimulai dari terbitnya Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDes, dimana desa yang ada sudah mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Bupati yang diterbitkan, lalu dilanjutkan dengan Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Perdes APBDes dimana seluruh desa melampirkan dalam suatu dokumen yang disebut dengan Proposal Pengajuan Penyaluran Pendapatan Desa, selanjutnya **Terbit Perdes APBDes** yang menjadi acuan Desa dalam pengelolaan keuangan di desa. Dari 96 Desa seluruh Desa di kabupaten kepulauan meranti pada tahun 2019 telah tertib aturan dan ketentuan dalam pengelolaan APBDes.

Sub indikator Kedua, Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan, Dengan formulasi penghitungan yaitu jumlah seluruh desa yang tepat waktu dalam Penetapan Perdes APBDes dan tepat waktu dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dibagi dengan jumlah seluruh desa.

Tepat Waktu artinya Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, dimana Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti harus memperhatikan dan mengikuti Waktu Penetapan Perdes APBDes dan Waktu Penyampaian Laporan Realisasi APBDes. Berikut Tabel Laporan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun 2019 dan Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019.

Tabel 3.8
Laporan Waktu Penetapan Perdes APBDes dan Penyampaian Laporan Realisasi APBDes
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NO	DESA	Waktu Penetapan Perdes APBDes	Penyampaian Laporan Realisasi APBDes	
				Tahun 2019	Tahun 2019	
				Maksimal Tanggal 31 Desember 2018	Laporan Semester I (Maksimal Bulan Juli 2019)	Laporan Semester II (Maksimal Akhir Januari 2020)
1	TEBING TINGGI	1	DESA ALAH AIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA ALAH AIR TIMUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA BANGLAS	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANGLAS BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA SESAP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
II	TEBING TINGGI BARAT					
		1	DESA ALAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA INSIT	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TENAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANJUNG PERANAP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKONG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA BATANG MALAS	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA KUNDUR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA MENGGIKIP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MANTIASA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA GOGOK DARUSSALAM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA ALAI SELATAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA MAINI DARUL AMAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		14	DESA TANJUNG DARUL TAKZIM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
III	TEBING TINGGI TIMUR					
		1	DESA LUKUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SUNGAI TOHOR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KEPAU BARU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TELUK BUNTAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA NIPAH SENDANU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA TANJUNG GADAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA TANJUNG SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari

		8	DESA BATIN SUIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SENDANU DARUL IHSAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
IV	PULAU MERBAU					Bulan Januari
		1	DESA BARAN MELINTANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA RENAK DUNGUN	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KUALA MERBAU	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG BUNGA	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TELUK KETAPANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA CENTAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SEMUKUT	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PADANG KAMAL	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA PANGKALAN BALAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA BATANG MERANTI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA KETAPANG PERMAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
V	MERBAU					
		1	DESA TANJUNG KULIM	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA PELANTAI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA LUKIT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BAGAN MELIBUR	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA MERANTI BUNTING	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKAR SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MAYANG SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA SUNGAI ANAK KAMAL	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TENGAH	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
VI	TASIK PUTRI PUYU					
		1	DESA MENGGOPOT	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA MENGGIRAU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG PADANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANDUL	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA KUDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SELAT AKAR	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA DEDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PUTRI PUYU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TANJUNG PISANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MEKAR DELIMA	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
VII	RANGSANG					
		1	DESA TANJUNG SAMAK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA TANJUNG BAKAU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG MEDANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari

		4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA REPAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA PENYAGUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA GEMALA SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELUK SAMAK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TOPANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA CITRA DAMAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TEBUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA DWI TUNGGAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA TANJUNG GEMUK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		14	DESA WONOSARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
VIII	RANGSANG BARAT					
		1	DESA BANTAR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SEGOMENG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA ANAK SETATAH	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA LEMANG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA BOKOR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SUNGAI CINA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MELAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELAGA BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA BINA MAJU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SIALANG PASUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA MEKAR BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA PERMAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
IX	RANGSANG PESISIR					
		1	DESA KEDABU RAPAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA KAYU ARA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA SONDE	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA SENDAUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANAH MERAH	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA BUNGUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SOKOP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA BETING	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TELESUNG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA TENGGAYUN RAYA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TANJUNG KEDABU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
TOTAL PERSENTASE				100 % Desa Tertib Aturan dan Ketentuan	100 % Desa Tepat Waktu Semester I	100 % Desa Tepat Waktu Semester II

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari Tabel 3.8 diatas dapat kita jelaskan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2019 terbagi kedalam dua tahap laporan, yang *Pertama*, Laporan Semester I kurun waktunya maksimal bulan Juli tahun berjalan, yang *Kedua*, Laporan Semester II dengan kurun waktu maksimal akhir januari Tahun berikutnya (n + 1) . Selama Tahun 2019 Jumlah Desa dengan Laporan Tepat Waktu Semester I sebanyak 95Desa, artinya ada satu desa yang belum tepat waktu dalam menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Semester I, untuk Semester II dari 96 Desa ternyata seluruh Desa yang Tepat waktu dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Indikator kedua yaitu Persentase Lembaga Desa Aktif, Indikator Sasaran Persentase Lembaga Desa Aktif mengandung makna bahwa Lembaga Desa memiliki tugas membantu pemerintahan desa dan juga merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Semua aturan ini menuntut lembaga-lembaga yang ada dan berkembang dimasyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki akan membuahkan hasil keberdayaan masyarakat yang semakin membaik.

Indikator ketiga yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif, dimana lembaga kemasyarakatan aktif dimaknai sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan ini dalam rangka untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di desa, salah satunya adalah peran PKK dalam pembangunan di desa.

Indikator keempat adalah Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, dimana indikator ini merupakan salah satu cara atau pendekatan dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di pedesaan.

Capaian indikator untuk mencapai sasaran strategis pertama serta perbandingan kinerja untuk sasaran 1 akan disajikan berikut ini :

Perbandingan Kinerja

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019

Untuk mengetahui indikator kinerja utama berhasil atau tidak dapat dilihat dari realisasinya. Realisasi indikator kinerja utama sasaran 1 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	Persentase	85 %	100 %	118 %
	1.1 Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan	Persentase	85 %	100 %	118 %
	1.2 Tepat Waktu : Tidak Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan	Persentase	85 %	100 %	118 %
2	Persentase Lembaga Desa Aktif	Persentase	80 %	96,88 %	121,1 %
3	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Persentase	80 %	100 %	125 %
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Kelompok	9	11	122,2 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80 %	80 %	100 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab.Kepulauan Meranti Tahun 2019

Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu dengan dua sub indikator yaitu Tertib aturan ketentuan dan tepat waktu yang ditargetkan

sebesar 85 % memiliki realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya sebesar 118 %. Untuk Capaian Sub Indikator pertama Capaian targetnya sebesar 118 %, dari target yang ditetapkan sebesar 85 %, ini mengandung arti bahwa seluruh Desa Se Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan APBDes sudah tertib aturan dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Untuk Sub Indikator kedua memiliki capaian yang sama yaitu 118 %, dari target sebesar 85 % namun realisasi sebesar 100 %, dan ini juga menunjukkan bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaporkan tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam penyampaian Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019.

Untuk indikator ketiga yaitu Persentase Lembaga Desa aktif Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80 %. Untuk tahun ini yaitu tahun 2019 setiap desa sudah diwajibkan untuk memiliki BUMDes, jika dijumlahkan terdapat 96 BUMDes yang sudah terbentuk di Desa Se Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara dari 96 Desa terdapat 93 (Sembilan Puluh Tiga) Unit BUMDES yang aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk formulasi penghitungan Lembaga Desa Aktif diukur dengan Jumlah Lembaga desa aktif dalam hal ini BUMDES tahun ini dibagi dengan jumlah seluruh Lembaga Desa (Dalam hal ini BUMDES) yang sudah terbentuk. Dalam hal ini BUMDES, dikalikan dengan 100 %, Sehingga realisasi dari Target yang ditentukan sebesar 96,88 %, dan capaian kinerja Lembaga Desa Aktif pada tahun 2019 yaitu sebesar 121,1 %.

Untuk BUMDES yang aktif pada Tahun ini berjumlah sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) unit BUMDES, sisanya yaitu sebanyak 3 (Tiga) BUMDES yang dikategorikan masih belum aktif, sehingga realisasi sebesar 96,88 %, dengan capaian 121,1 %.

Untuk indikator ketiga yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif pada Tahun 2019 ditargetkan sesuai indikator kinerja sebesar 80 % juga, dimana yang menjadi ukuran untuk lembaga kemasyarakatan aktif ini adalah Peran dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang ada baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Realisasi Peran PKK yang aktif pada tahun 2019 mencapai 100 %, artinya seluruh PKK yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti aktif semua. Sehingga besaran capaian sebesar 125 %.

Untuk indikator keempat realisasi jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG pada Tahun 2019 adalah sebanyak 11 Kelompok. Indikator ini melebihi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 sebanyak 9 Kelompok. Capaian kinerja indikator ini sebesar 122,2 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk Indikator kelima yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan Survey Penilaian Pelayanan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada aparatur Pemerintahan Desa, dimana survey yang didapatkan dengan formulasi Penghitungan IKM berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana pada Tahun 2019 IKM Pada Dinas PMD terealisasi sebesar 80 %, hal sesuai dengan Target yang ditentukan sebesar 80 %, sehingga realisasi IKM Dinas PMD Pada Tahun 2018 mencapai 100 %.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR		2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	80 %	99 %	124 %	85 %	100 %	118 %
	1.1 Tertib Aturan dan Ketentuan	80 %	99 %	124 %	85 %	100 %	118 %
	1.2 Tepat waktu : tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	80 %	99 %	124 %	85 %	100 %	118 %
2	Persentase Lembaga Desa Aktif	75 %	92,72 %	123,64 %	80 %	96,88 %	121,1 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	75 %	100 %	133,3 %	80 %	100 %	125 %
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	7 Kelompok	10 Kelompok	143 %	9	11	122,2 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	80 %	106,7 %	80 %	80 %	100 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

1. Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu.

Tahun 2018 desa dengan pengelolaan APBDes tertib dan tepat waktu memiliki target 80 %, realisasi sebesar 99 %, sehingga capaian sebesar 124 %, artinya hampir seluruh Desa yang ada di kabupaten kepulauan meranti melaksanakan pengelolaan APBDes tertib dan tepat waktu, sedangkan untuk Tahun 2019 DPMD menargetkan sebesar 85 % desa dengan pengelolaan APBDes tertib dan tepat waktu dan realisasi yang tercapai sebesar 100 %, dan capaiannya adalah sebesar 118 % dan ini dikategorikan sangat baik. Penurunan beberapa poin sejumlah 6 % dari angka capaian Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 118 % capaiannya, sebenarnya bukanlah menjadi penurunan dalam kinerja, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2019 naik menjadi 85 %, dibandingkan target pada tahun 2018 yang hanya sebesar 80 %,

namun dalam jumlah desa dengan pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu mengalami peningkatan penurunan, dimana pada Tahun 2018 terdapat Satu (1) Desa yang Tidak Tertib dan Tepat Waktu dalam Pengelolaan APBDes, sementara pada Tahun 2019 tidak ada Desa yang tidak Tertib dan Tepat Waktu dalam pengelolaan APBDes, namun perlu diingat bahwa antara realisasi yang ada selalu melebihi target indikator yang ada, hal ini menandakan bahwa capaian kinerja yang baik.

Untuk persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat waktu dapat dijelaskan melalui dua sub indikator, *Pertama*, Tertib aturan ketentuan dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Berikut disajikan tabel rekapitulasi desa yang Tertib aturan ketentuan dan tepat waktu.

Tabel 3.11
Rakapitulasi Desa dengan Pengelolaan APBDes yang sesuai dengan
Skema Aturan Pengelolaan APBDes
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

NO			Desa	Skema Aturan Pengelolaan APBDes		
				Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDes	Keputusan Camat Tentang Hasil Evaluasi Perdes APBDes	Perdes APBDes
1	TEBING TINGGI	1	DESA ALAH AIR	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA ALAH AIR TIMUR	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA BANGLAS	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BANGLAS BARAT	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA SESAP	Sesuai	Ada	Ada
2	TEBING TINGGI BARAT					
		1	DESA ALAI	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA INSIT	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TENAN	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TANJUNG	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TANJUNG PERANAP	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA MEKONG	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA BATANG MALAS	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA KUNDUR	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA MENGGIKIP	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA MANTIASA	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA GOGOK DARUSSALAM	Sesuai	Ada	Ada
		12	DESA ALAI SELATAN	Sesuai	Ada	Ada
		13	DESA MAINI DARUL AMAN	Sesuai	Ada	Ada
14	DESA TANJUNG DARUL TAKZIM	Sesuai				
3	TEBING TINGGI TIMUR					
		1	DESA LUKUN	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA SUNGAI TOHOR	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA KEPAU BARU	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TELUK BUNTAL	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA NIPAH SENDANU	Sesuai	Ada	Ada
6	DESA TANJUNG GADAI	Sesuai	Ada	Ada		

		7	DESA TANJUNG SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA BATIN SUJR	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA SENDANU DARUL IHSAN	Sesuai	Ada	Ada
4	PULAU MERBAU					
		1	DESA BARAN MELINTANG	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA RENAK DUNGUN	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA KUALA MERBAU	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TANJUNG BUNGA	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TELUK KETAPANG	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA CENTAI	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA SEMUKUT	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA PADANG KAMAL	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA PANGKALAN BALAI	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA BATANG MERANTI	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA KETAPANG PERMAI	Sesuai	Ada	Ada
5	MERBAU					
		1	DESA TANJUNG KULIM	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA PELANTAI	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA LUKIT	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BAGAN MELIBUR	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA MERANTI BUNTING	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA MEKAR SARI	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA MAYANG SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA SUNGAI ANAK KAMAL	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA SUNGAI TENGAH	Sesuai	Ada	Ada
6	TASIK PUTRI PUYU					
		1	DESA MENGGOPOT	Belum Sesuai	Tidak Ada	Tidak Ada
		2	DESA MENGGIRAU	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TANJUNG PADANG	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BANDUL	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA KUDAP	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA SELAT AKAR	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA DEDAP	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA PUTRI PUYU	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TANJUNG PISANG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA MEKAR DELIMA	Sesuai	Ada	Ada
7	RANGSANG					
		1	DESA TANJUNG SAMAK	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA TANJUNG BAKAU	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TANJUNG MEDANG	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA REPAN	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA PENYAGUN	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA GEMALA SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA TELUK SAMAK	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TOPANG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA CITRA DAMAI	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA TEBUN	Sesuai	Ada	Ada
		12	DESA DWI TUNGGAL	Sesuai	Ada	Ada
		13	DESA TANJUNG GEMUK	Sesuai	Ada	Ada
		14	DESA WONOSARI	Sesuai	Ada	Ada
8	RANGSANG BARAT					
		1	DESA BANTAR	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA SEGOMENG	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA ANAK SETATAH	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA LEMANG	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA BOKOR	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA SUNGAI CINA	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA MELAI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA TELAGA BARU	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA BINA MAJU	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA SIALANG PASUNG	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA MEKAR BARU	Sesuai	Ada	Ada

		12	DESA PERMAI	Sesuai	Ada	Ada
9	RANGSANG PESISIR					
		1	DESA KEDABU RAPAT	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA KAYU ARA	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA SONDE	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA SENDAUR	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TANAH MERAH	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA BUNGUR	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA SOKOP	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA BETING	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TELESUNG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA TENGGAYUN RAYA	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA TANJUNG KEDABU	Sesuai	Ada	Ada

Sumber : Olahan Data Dari Dinas BPMPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Selanjutnya untuk Tahun 2019 Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki Indikator dan sasaran yang sama terhadap sasaran meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa, berikut disajikan tabel Rekapitulasi Desa dengan Pengelolaan APBDes yang sesuai dengan Skema Aturan Pengelolaan APBDes Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Desa dengan Pengelolaan APBDes yang sesuai dengan
Skema Aturan Pengelolaan APBDes
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

NO			Desa	Skema Aturan Pengelolaan APBDes		
				Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDes	Keputusan Camat Tentang Hasil Evaluasi Perdes APBDes	Perdes APBDes
1	TEBING TINGGI	1	DESA ALAH AIR	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA ALAH AIR TIMUR	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA BANGLAS	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BANGLAS BARAT	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA SESAP	Sesuai	Ada	Ada
2	TEBING TINGGI BARAT					
		1	DESA ALAI	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA INSIT	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TENAN	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TANJUNG	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TANJUNG PERANAP	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA MEKONG	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA BATANG MALAS	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA KUNDUR	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA MENGGIKIP	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA MANTIASA	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA GOGOK DARUSSALAM	Sesuai	Ada	Ada
		12	DESA ALAI SELATAN	Sesuai	Ada	Ada
		13	DESA MAINI DARUL AMAN	Sesuai	Ada	Ada
		14	DESA TANJUNG DARUL TAKZIM	Sesuai		

3	TEBING TINGGI TIMUR					
		1	DESA LUKUN	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA SUNGAI TOHOR	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA KEPAU BARU	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TELUK BUNTAL	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA NIPAH SENDANU	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA TANJUNG GADAI	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA TANJUNG SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA BATIN SUIR	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA SENDANU DARUL IHSAN	Sesuai	Ada	Ada
4	PULAU MERBAU					
		1	DESA BARAN MELINTANG	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA RENAK DUNGUN	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA KUALA MERBAU	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA TANJUNG BUNGA	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TELUK KETAPANG	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA CENTAI	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA SEMUKUT	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA PADANG KAMAL	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA PANGKALAN BALAI	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA BATANG MERANTI	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA KETAPANG PERMAI	Sesuai	Ada	Ada
5	MERBAU					
		1	DESA TANJUNG KULIM	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA PELANTAI	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA LUKIT	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BAGAN MELIBUR	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA MERANTI BUNTING	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA MEKAR SARI	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA MAYANG SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA SUNGAI ANAK KAMAL	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA SUNGAI TENGAH	Sesuai	Ada	Ada
6	TASIK PUTRI PUYU					
		1	DESA MENGGOPOT	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA MENGGIRAU	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TANJUNG PADANG	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA BANDUL	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA KUDAP	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA SELAT AKAR	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA DEDAP	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA PUTRI PUYU	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TANJUNG PISANG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA MEKAR DELIMA	Sesuai	Ada	Ada
7	RANGSANG					
		1	DESA TANJUNG SAMAK	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA TANJUNG BAKAU	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA TANJUNG MEDANG	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA REPAN	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA PENYAGUN	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA GEMALA SARI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA TELUK SAMAK	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TOPANG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA CITRA DAMAI	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA TEBUN	Sesuai	Ada	Ada
		12	DESA DWI TUNGGAL	Sesuai	Ada	Ada
		13	DESA TANJUNG GEMUK	Sesuai	Ada	Ada
		14	DESA WONOSARI	Sesuai	Ada	Ada
8	RANGSANG BARAT					
		1	DESA BANTAR	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA SEGOMENG	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA ANAK SETATAH	Sesuai	Ada	Ada

		4	DESA LEMANG	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA BOKOR	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA SUNGAI CINA	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA MELAI	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA TELAGA BARU	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA BINA MAJU	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA SIALANG PASUNG	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA MEKAR BARU	Sesuai	Ada	Ada
		12	DESA PERMAI	Sesuai	Ada	Ada
9	RANGSANG PESISIR					
		1	DESA KEDABU RAPAT	Sesuai	Ada	Ada
		2	DESA KAYU ARA	Sesuai	Ada	Ada
		3	DESA SONDE	Sesuai	Ada	Ada
		4	DESA SENDAUR	Sesuai	Ada	Ada
		5	DESA TANAH MERAH	Sesuai	Ada	Ada
		6	DESA BUNGUR	Sesuai	Ada	Ada
		7	DESA SOKOP	Sesuai	Ada	Ada
		8	DESA BETING	Sesuai	Ada	Ada
		9	DESA TELESUNG	Sesuai	Ada	Ada
		10	DESA TENGGAYUN RAYA	Sesuai	Ada	Ada
		11	DESA TANJUNG KEDABU	Sesuai	Ada	Ada

Sumber : Olahan Data Dari Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari perbandingan dua buah Tabel diatas terdapat perbedaan capaian dari Sub Indikator Pertama, yaitu jumlah Desa yang Tertib aturan dan ketentuan, dimana untuk Tahun 2018 Terdapat satu (1) Desa yang tidak tertib aturan dan ketentuan, sementara untuk tahun 2019 tidak ada Desa yang Tidak Tertib Aturan dan ketentuan, namu demikian capaian dari realisasi dan target selalu melebihi target yang ditentukan untuk setiap tahunnya, ini berarti bahwa Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti Telah Tertib aturan dan Ketentuan dalam Pengelolaan APBDes yang sesuai dengan Peraturan Bupati pada Tahun Pelaksanaan APBDes tersebut.

Untuk sub indikator kedua yaitu desa yang tepat waktu, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk tepat waktu dalam penetapan Perdes APBDes dan tepat waktu dalam penyampaian laporan realisasi APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tabel 3.13
Data Laporan Waktu Penetapan dan Penyampaian Realisasi Penggunaan APBDes Tahun 2018
Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KECAMATAN	NO	DESA	Waktu Penetapan Perdes APBDes	Penyampaian Laporan Realisasi APBDes	
				Tahun 2018	Tahun 2018	
				Maksimal Tanggal 31 Desember 2017	Laporan Semester I (Maksimal Bulan Juli 2018)	Laporan Semester II (Maksimal Akhir Januari 2019)
I	TEBING TINGGI	1	DESA ALAH AIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA ALAH AIR TIMUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA BANGLAS	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANGLAS BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA SESAP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
II	TEBING TINGGI BARAT					Bulan Januari
		1	DESA ALAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA INSIT	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TENAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANJUNG PERANAP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKONG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA BATANG MALAS	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA KUNDUR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA MENGGIKIP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MANTIASA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA GOGOK DARUSSALAM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA ALAI SELATAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA MAINI DARUL AMAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
14	DESA TANJUNG DARUL TAKZIM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari		
III	TEBING TINGGI TIMUR					
		1	DESA LUKUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SUNGAI TOHOR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KEPAU BARU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TELUK BUNTAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA NIPAH SENDANU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA TANJUNG GADAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
7	DESA TANJUNG SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari		

		8	DESA BATIN SUIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SENDANU DARUL IHSAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
IV	PULAU MERBAU					
		1	DESA BARAN MELINTANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA RENAK DUNGUN	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KUALA MERBAU	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG BUNGA	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TELUK KETAPANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA CENTAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SEMUKUT	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PADANG KAMAL	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA PANGKALAN BALAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA BATANG MERANTI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA KETAPANG PERMAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
V	MERBAU					
		1	DESA TANJUNG KULIM	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA PELANTAI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA LUKIT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Februari 2018
		4	DESA BAGAN MELIBUR	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA MERANTI BUNTING	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKAR SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MAYANG SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA SUNGAI ANAK KAMAL	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TENGAH	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
VI	TASIK PUTRI PUYU					Bulan Januari
		1	DESA MENGKOPOT	Tidak Ada / Belum	Tidak Ada / Belum	Tidak Ada / Belum
		2	DESA MENGKIRAU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG PADANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANDUL	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA KUDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SELAT AKAR	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA DEDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PUTRI PUYU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TANJUNG PISANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MEKAR DELIMA	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
VII	RANGSANG					
		1	DESA TANJUNG SAMAK	Bulan Mei	Bulan Desember	Bulan Januari
		2	DESA TANJUNG BAKAU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG MEDANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Februari 2018

		4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA REPAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA PENYAGUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA GEMALA SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELUK SAMAK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TOPANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA CITRA DAMAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TEBUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA DWI TUNGGAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA TANJUNG GEMUK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		14	DESA WONOSARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
VIII	RANGSANG BARAT					
		1	DESA BANTAR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SEGOMENG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA ANAK SETATAH	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA LEMANG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA BOKOR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SUNGAI CINA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MELAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELAGA BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA BINA MAJU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SIALANG PASUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA MEKAR BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA PERMAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
IX	RANGSANG PESISIR					
		1	DESA KEDABU RAPAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA KAYU ARA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA SONDE	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA SENDAUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANAH MERAH	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA BUNGUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SOKOP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA BETING	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TELESUNG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA TENGGAYUN RAYA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TANJUNG KEDABU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
TOTAL PERSENTASE				100 % Desa Tertib Aturan dan Ketentuan	99 % Desa Tepat Waktu Semester I	99 % Desa Tepat Waktu Semester II

Sumber : Olahan Data DPMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2018

Tabel 3.14
Laporan Waktu Penetapan Perdes APBDes dan Penyampaian Laporan Realisasi APBDes
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NO	DESA	Waktu Penetapan Perdes APBDes	Penyampaian Laporan Realisasi APBDes	
				Tahun 2019	Tahun 2019	
				Maksimal Tanggal 31 Desember 2018	Laporan Semester I (Maksimal Bulan Juli 2019)	Laporan Semester II (Maksimal Akhir Januari 2020)
1	TEBING TINGGI	1	DESA ALAH AIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA ALAH AIR TIMUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA BANGLAS	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANGLAS BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA SESAP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
II	TEBING TINGGI BARAT					
		1	DESA ALAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA INSIT	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TENAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANJUNG PERANAP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKONG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA BATANG MALAS	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA KUNDUR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA MENGGIKIP	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MANTIASA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA GOGOK DARUSSALAM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA ALAI SELATAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA MAINI DARUL AMAN	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		14	DESA TANJUNG DARUL TAKZIM	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
III	TEBING TINGGI TIMUR					
		1	DESA LUKUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SUNGAI TOHOR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KEPAU BARU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TELUK BUNTAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA NIPAH SENDANU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA TANJUNG GADAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA TANJUNG SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari

		8	DESA BATIN SUIR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TOHOR BARAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SENDANU DARUL IHSAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
IV	PULAU MERBAU					Bulan Januari
		1	DESA BARAN MELINTANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA RENAK DUNGUN	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA KUALA MERBAU	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA TANJUNG BUNGA	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TELUK KETAPANG	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA CENTAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SEMUKUT	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PADANG KAMAL	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA PANGKALAN BALAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA BATANG MERANTI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA KETAPANG PERMAI	Bulan Juli	Bulan Juli	Bulan Januari
V	MERBAU					
		1	DESA TANJUNG KULIM	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA PELANTAI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA LUKIT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BAGAN MELIBUR	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA MERANTI BUNTING	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA MEKAR SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MAYANG SARI	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA SUNGAI ANAK KAMAL	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA SUNGAI TENGAH	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Januari
VI	TASIK PUTRI PUYU					
		1	DESA MENGGOPOT	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA MENGGIRAU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG PADANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA BANDUL	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA KUDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SELAT AKAR	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA DEDAP	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA PUTRI PUYU	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TANJUNG PISANG	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA MEKAR DELIMA	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Januari
VII	RANGSANG					
		1	DESA TANJUNG SAMAK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA TANJUNG BAKAU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA TANJUNG MEDANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari

		4	DESA SUNGAI GAYUNG KIRI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA REPAN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA PENYAGUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA GEMALA SARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELUK SAMAK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TOPANG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA CITRA DAMAI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TEBUN	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA DWI TUNGGAL	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		13	DESA TANJUNG GEMUK	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		14	DESA WONOSARI	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
VIII	RANGSANG BARAT					
		1	DESA BANTAR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA SEGOMENG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA ANAK SETATAH	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA LEMANG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA BOKOR	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA SUNGAI CINA	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA MELAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA TELAGA BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA BINA MAJU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA SIALANG PASUNG	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA MEKAR BARU	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
		12	DESA PERMAI	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Januari
IX	RANGSANG PESISIR					
		1	DESA KEDABU RAPAT	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		2	DESA KAYU ARA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		3	DESA SONDE	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		4	DESA SENDAUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		5	DESA TANAH MERAH	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		6	DESA BUNGUR	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		7	DESA SOKOP	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		8	DESA BETING	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		9	DESA TELESUNG	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		10	DESA TENGGAYUN RAYA	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
		11	DESA TANJUNG KEDABU	Bulan Mei	Bulan Juli	Bulan Januari
TOTAL PERSENTASE				100 % Desa Tertib Aturan dan Ketentuan	100 % Desa Tepat Waktu Semester I	100 % Desa Tepat Waktu Semester II

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Pemerintahan Desa dalam hal ini ada sebanyak 96 (Sembilan Puluh Enam) Desa yang secara administrasi pemerintahannya berada dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana Pemerintahan Desa yang ada dinilai sangat mampu dalam mengelola APBDes secara tertib yaitu Tertib Aturan dan Ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran APBDes Tahun anggaran berjalan yang realisasinya mencapai 100 % dari target yang ditetapkan.

2. Persentase Lembaga Desa Aktif

Pada tahun 2018 Persentase Lembaga Desa aktif memiliki Target sebesar 75% dengan realisasi sebesar 92,72 %, sementara untuk tahun 2019 Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti menambah target menjadi 80 % dengan realisasi sebesar 96,88 %. Untuk capaian kinerja indikator pada tahun 2018 sebesar 92,73 %, dan tahun 2019 capaian kinerja pada Persentase Lembaga Desa Aktif sebesar 123,64 %, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 121,1 %, penurunan angka persen capaian sebesar 2 % ini bukanlah mempengaruhi kinerja yang ada, namun penurunan angka sebesar 2 % dikarenakan target yang ditetapkan mengalami kenaikan untuk tahun 2019, dengan capaian kinerja sebesar 121,1 %.

Tabel : 3.15
Data BUMDES Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

NO	PENDAMPING	KECAMATAN	DESA	BUMDES		NAMA BUMDES	NAMA DIREKTUR	JENIS USAHA
				AKTIF	TIDAK			
1	ANNISA	TEBING TINGGI	BANGLAS	✓		BANGLAS LESTARI	JUNEDI	
			BANGLAS BARAT	✓		AGRO LESTARI	MARHALIM	JASA PENYEBRANGAN, LISTRIK DESA
			ALAH AIR	✓		ALAH AIR MANDIRI JAYA	SUNHAJI	SIMPAN PINJAM, KREDIT BARANG
			ALAH AIR TIMUR	✓		MEKAR JAYA	ARIYANTO	SIMPAN PINJAM
			SESAP	✓		RUMBIA LESTARI	MAISYAROH, SE	SIMPAN PINJAM, KREDIT BARANG, PERDAGANGAN
			JUMLAH	5				
2	SAMSURI, S.Pdi	TEBING TINGGI BARAT	ALAI		✓			
			MEKONG	✓				
			BATANG MALAS	✓				
			TENAN	✓				
			KUNDUR	✓				
			INSIT		✓			
			TANJUNG PERANAP		✓			
			MANTIASA		✓			
			GOGOK DARUSSALAM		✓			
			MAINI		✓			
			DARUL AMAN		✓			
			TANJUNG DARUL TAKZIM		✓			
			MENGKIKIP		✓			
ALAI SELATAN		✓						
			JUMLAH	4				
3	YOGI SUGANA, S.Pd	TEBING TINGGI TIMUR	SUNGAI TOHOR	✓		TOHOR BESTARI	SUHAILI	PLTD, AIR BERSIH, GULA SAGU
			NIPAH SENDANU	✓		TUAH SENDANU	ALZUKRI, SH	PLTD, PASAR DESA, SIMPAN PINJAM
			TANJUNG SARI	✓		SINAR SEJAHTERA	USMAN	PLTD, BUDIDAYA LEBAH MADU

			TANJUNG GADAI	✓		BERSUA LESTARI	SOFYAN HADI	PERALATAN PESTA
			TELUK BUNTAL	✓		GEWANG FINANSIAL	RAHMAT	PERALATAN PESTA
			KEPAU BARU		✓			
			LUKUN	✓		LUKUN SEJAHTERA	SAFWAN	PLTD, SIMPAN PINJAM
			SUNGAI TOHOR BARAT	✓		CAHAYA MERANTI	KHARUDIN	PLTD
			SENDANU DARUL IHSAN	✓		DARUL IKHSAN MAKMUR	NIZAR	PLTD
			BATIN SUIR	✓		CAHAYA ABADI	TONO	PLTD
			JUMLAH	9				
4	RENI TRISTIANA, S.Pd	RANGSANG	TANJUNG SAMAK		✓			
			TANJUNG MEDANG		✓			
			TOPANG	✓		BUNGA TANJUNG		
			REPAN		✓			
			PENYAGUN		✓			
			GEMALA SARI		✓			
			TELUK SAMAK	✓		ARTA NIAGA	SUTARNO	AIR GALON, TABUNG ELPIJI, SP
			TANJUNG BAKAU		✓			
			SUNGAI GAYUNG KIRI	✓		ANUGERAH ILAHI	ANDI INDRAWAN	PABRIK ES MINI
			CITRA DAMAI		✓			
			WONOSARI		✓			
			TEBUN	✓		BUMDES TEBUN	MANDIRI	PLTD,PASAR,BBM
			TANJUNG GEMUK		✓			
			DWI TUNGGAL		✓			
			JUMLAH	4				
5	AHMAD FAWAHID, S.Sos	RANGSANG BARAT	BANTAR	✓				
			ANAK SETATAH	✓		ASTA LESTARI	TUT TRIAWAN	SIMPAN PINJAM
			TELAGA BARU	✓		BUMDES BERKAH	AHMAD ARIFIN	SIMPAN PINJAM
			SEGOMENG	✓				
			MELAI	✓		KARYA BERSAMA	MUHAMMAD	SIMPAN PINJAM
			SUNGAI CINA		✓			
			BOKOR	✓		BOKOR MANDIRI	HARPEN SUHENDRA	SIMPAN PINJAM

			LEMANG	✓		LEMANG JAYA	ABDUL RAUF	SIMPAN PINJAM
			SIALANG PASUNG	✓				
			BINA MAJU	✓		USAHA JAYA	FAHRUROZI	SIMPAN PINJAM, JASA PERCETAKAN
			PERMAI	✓				
			MEKAR BARU	✓				
			JUMLAH	11				
6	AMANSYAH	RANGSANG PESISIR	SONDE		✓			
			SENDAUR		✓			
			KAYU ARA		✓			
			KEDABU RAPAT		✓			
			TANAH MERAH	✓				
			TANJUNG KEDABU	✓				
			BETING	✓				
			SOKOP	✓				
			BUNGUR	✓				
			TELESUNG	✓				
			TENGGAYUN RAYA	✓				
			JUMLAH	7				
7		MERBAU	TELUK BELITUNG		✓			
			BAGAN MELIBUR		✓			
			MEKAR SARI		✓			
			MERANTI BUNTING	✓				
			TANJUNG KULIM		✓			
			LUKIT		✓			
			PELANTAI	✓				
			SUNGAI ANAK KAMAL	✓	✓			
			SUNGAI TENGAH		✓			
			MAYANG SARI		✓			
			JUMLAH	2				
8	M. FAISAL, S.Sos	PULAU MERBAU	SEMUKUT	✓		SETIA JAYA		
			BARAN MELINTANG	✓		SETIA MEKAR		

			CENTAI KUALA MERBAU		✓			
			RENAK DUNGUN		✓			
			TELUK KETAPANG	✓				
			TANJUNG BUNGA	✓		MAJU SERENTAK	M. RIDWAN	
			PADANG KAMAL	✓		SUMBER MAKMUR	M. SAIFUL	
			BATANG MERANTI		✓			
			PANGKALAN BALAI		✓			
			JUMLAH	5				
9		TASIK PUTRI PUYU	BANDUL	✓				
			TANJUNG PADANG		✓			
			DEDAP		✓			
			KUDAP	✓				
			SELAT AKAR		✓			
			MENGGOPOT		✓			
			MENGGIRAU	✓				
			MEKAR DELIMA		✓			
			TANJUNG PISANG		✓			
			PUTRI PUYU		✓			
			JUMLAH	3				
TOTAL BUMDES AKTIF				51 UNIT				

Sumber Data : Olahan DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Tabel : 3.16
DATA BUMDES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 YANG AKTIF

N O	NAMA BUMDES	DESA / KELURAHAN	KABUPATEN	JENIS USAHA	BUMDES	
				(Bisa Lebih Dari Satu)	AKTIF	TIDAK
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU						
1	Al Madani	Mengkirau	Kepulauan Meranti	1. Ayam Telor	✓	
2	Usaha Bersama	Mengkopot	Kepulauan Meranti	1. Material	✓	
3	Bakti Jaya	Tanjung Pisang	Kepulauan Meranti	1. Penampungan Bata	✓	
4	Selat Akar	Selat Akar	Kepulauan Meranti	1. Mitra Pamsimas 2. Lapak Pasar	✓	
5	Mandiri	Bandul	Kepulauan Meranti	1. Distributor Bbm	✓	
6	Mandiri	Kudap	Kepulauan Meranti	1. Warung Desa 2. Depot Air Bersih	✓	
7	Al Barokah	Dedap	Kepulauan Meranti	1. Warung Harian Bumdes 2. Distributor Lpg	✓	
8	Karya Jaya	Mekar Delima	Kepulauan Meranti	(Belum Verifikasi)		✓

9	Kembang Harapan	Putri Puyu	Kepulauan Meranti	1. Material	✓	
10	Sinar Tanjung	Tanjung Padang	Kepulauan Meranti	(Belum Verifikasi)		✓
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR						
11	Bersua Lestari	Tanjung Gadai	KEPULAUAN MERANTI	1. Jasa Sewa Alat Pesta 2. UED-SP 3. Budi Daya Sarang Burung Walet	✓	
12	Giwang Financial	Teluk Buntal	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam 2. Kilang sagu	✓	
13	Citra Mandiri	Tanjung Sari	KEPULAUAN MERANTI	1. Listrik 2. Budi Daya Madu kelulut 3. UED-SP 2. Suplayer Pasir Batu Bangunan	✓	
14	Sendanu Makmur	Sendanu Darul Iksan	KEPULAUAN MERANTI	1. Listrik 2. Suplayer Pasir Batu Bangunan	✓	
15	Tuah Sendanu	Nipah Sendanu	KEPULAUAN MERANTI	1. UED -SP 2. Listrik 3. Pasar Desa 4. Suplayer Pasir Batu Bangunan	✓	

16	Tohor Bestari	Sungai Tohor	KEPULAUAN MERANTI	1.Listrik 2.UED-SP 3. Jasa Sewa Rumah Singgah 4. Jual Tiket Kapal 5.Air Kekap 6.Depot Air Minum	✓	
17	Cahaya Meranti	Sungai Tohor Barat	KEPULAUAN MERANTI	1.Listrik 2.Kilang Sagu	✓	
18	Cahaya Abadi	Batin Suir	KEPULAUAN MERANTI	1.Simpan Pinjam 2.Suplayer Pasir Batu Bangunan	✓	
19	Lukun Sejahtera	Lukun	KEPULAUAN MERANTI	1.Listrik 2.UED-SP 3. Suplayer Pasir Batu Bangunan	✓	
20	Kepau Lestari Satu	Kepau Baru	KEPULAUAN MERANTI	1.Penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak)	✓	
KECAMATAN RANGSANG						
21	Sido maju	Tebun	KEPULAUAN MERANTI	1. Pasar desa 2. BBM	✓	
22	Mitra Usaha	Repan	KEPULAUAN MERANTI	1. Suplyer material	✓	
23	Sinar Mentari	Penyagun	KEPULAUAN MERANTI	1. Suplyer material	✓	
24	Karya Bestari	Gemalasari	KEPULAUAN MERANTI	1. Suplyer bahan pertanian	✓	

25	Artha Niaga	Teluksamak	KEPULAUAN MERANTI	1. UED-SP 2. Suplyer batu dan pasir 3. Nelayan 4. Peternakan Itik	✓	
26	Sari Makmur	Wonosari	KEPULAUAN MERANTI	1. Pertanian jahe dan kencur	✓	
27	Suka Damai	Citra damai	KEPULAUAN MERANTI	1. Suplyer material	✓	
28	Samak Garda Gemilang	Tanjung samak	KEPULAUAN MERANTI	1. Alat2 motor	✓	
29	Kejora Tunggal	Dwi tunggal	KEPULAUAN MERANTI	1. BRI Link	✓	
30	Globalisasi Usaha	Tanjung bakau	KEPULAUAN MERANTI	1. BBM	✓	
31	Subur Makmur	Tanjung gemuk	KEPULAUAN MERANTI	1. Suplyer 2. Warung Desa	✓	
32	Medang Gemilang	Tanjung medang	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan Bahan kebutuhan masyarakat	✓	
33	Anugerah Permai	Sei gayung kiri	KEPULAUAN MERANTI	1. Jual garam dan kerupuk	✓	
34	Topang Sejahtera	Topang	KEPULAUAN MERANTI	1. Beli hasil panen masyarakat	✓	
KECAMATAN PULAU MERBAU						
35	Bhakti Pertiwi	Semukut	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. Kredit barang (pembiayaan)	✓	
36	Cindai Berseri	Centai	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. (simpan Pinjam)	✓	

37	Bina Maju	Pangkalan Balai	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. Kredit barang 3. Peternakan dan Perikanan	✓	
38	Bina Mandiri	Renak Dungun	KEPULAUAN MERANTI	1. perdagangan 2.kredit barang 3. pertanian dan pembibitan	✓	
39	Maju Serentak	Tanjung Bunga	KEPULAUAN MERANTI	1. jasa (Angkutan laut/ pengadaan Kapal)	✓	
40	Teluk Ketapang mandiri	Teluk Ketapang	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. jasa	✓	
41	Permai Muda	Ketapang Permai	KEPULAUAN MERANTI	1.Perdagangan 2. pengolahan Terasi	✓	
42	Meranti Sejahtera	Batang Meranti	KEPULAUAN MERANTI	1. perdagangan 2.Jasa 3. pertanian,perikanan dan peternakan	✓	
43	Puteri Panglima	Baran Melintang	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. Jasa 3. Pengolahan Terasi	✓	
44	Sumber Makmur	Padang Kamal	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan 2. jasa	✓	
45	Merbau Sejati	Kuala Merbau	KEPULAUAN MERANTI	Belum Verivikasi		✓
KECAMATAN MERBAU						
46	Bunga Meranti	Meranti Bunting	KEPULAUAN MERANTI	1. Penyediaan pasir Batu. 2. Jasa Transportasi. 3. Simpan Pinjam	✓	

47	Toyo Arbit	Sungai Anak Kamal	KEPULAUAN MERANTI	1. Pengadaan Alat Perkebunan. 2. Pengadaan alat elektronik. 3. Penyaluran air Bersih	✓	
48	Sehati Sejahtera Bersama	Sungai Tengah	KEPULAUAN MERANTI	1. Perdagangan Barang (Sembako) 2. Jasa Transportasi	✓	
49	Maju Jaya	Pelantai	KEPULAUAN MERANTI	1. Penyewaan Tenda. 2. Depot air minum. 3. Penjualan ATK	✓	
50	Payung Negri	Lukit	KEPULAUAN MERANTI	1. Penjualan Besi. 2. Depot air Minum	✓	
51	Mitra Abadi	Mekar Sari	KEPULAUAN MERANTI	1. Menjual produk Olahan Sagu. seperti Kue	✓	
52	Usaha Makaryo	Bagan Melibur	KEPULAUAN MERANTI	1. Penyewaan Tenda	✓	
53	Usaha Berkah	Mayang Sari	KEPULAUAN MERANTI	1. Gumbang bilis. 2. Menjual Es krim	✓	
54	Hasrat Jaya	Tanjung Kulim	KEPULAUAN MERANTI	1. Penyediaan berbagai jenis barang.	✓	
KECAMATAN RANGSANG PESISIR						
55	KEDABURAPAT CEMERLANG	KEDABURAPAT	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
56	TANAH MERAH JAYA	TANAH MERAH	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
57	SONDE GEMILANG	SONDE	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	

58	USAHA BERSAMA	KAYU ARA	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	
59	SENDAUR MANDIRI	SENDAUR	KEPULAUAN MERANTI	1.PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
60	JAYA RAYA	TENGAYUN RAYA	KEPULAUAN MERANTI	1.PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
61	PAYUNG HARAPAN	BUNGUR	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	
62	BUMI CAHAYA TELESUNG	TELESUNG	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	
63	BERKAH USAHA	TANJUNG KEDABU	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	
64	MITRA USAHA	SOKOP	KEPULAUAN MERANTI	1.PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
65	SINAR MAS DESA BETING	BETING	KEPULAUAN MERANTI	1.PERDAGANGAN 2. JASA	✓	
KECAMATAN TEBING TINGGI						
66	MEKAR JAYA	ALAHAIR TIMUR	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT SIMPAN PINJAM, 2. UNIT PERKREDITAN BARANG	✓	
67	ALAHAIR MANDIRI JAYA	ALAHAIR	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT SINPAN PINJAM, 2. UNIT PERKREDITAN BARANG 3. UNIT PERDAGANGAN	✓	
68	BANGLAS BESTARI	BANGLAS	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT WISATA MANGROVE	✓	
69	AGRO LESTARI	BANGLAS BARAT	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT PANGKALAN LPG, 2. UNIT ATK & TOKEN LISTRIK	✓	

70	RUMBIA LESTARI	SESAP	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT SIMPAN PINJAM, 2. UNIT PERKREDITAN BARANG, 3. UNIT PERDAGANGAN	✓	
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT						
71	PERKASA	ALAI	KEPULAUAN MERANTI	1. TAMAN WISATA	✓	
				2. BENGKEL	✓	
				3. PERKEBUNAN	✓	
72	TUNAS MUDA	ALAI SELATAN	KEPULAUAN MERANTI	1. PLASMANAN	✓	
				2. ACESORIS HP	✓	
				3. ATK	✓	
				4. TOKEN / PULSA	✓	
73	INSIT BERTARAF	INSIT	KEPULAUAN MERANTI	1. Matrial BANGUNAN	✓	
				2. BUDI DAYA SELEDRI	✓	
				3. PAPAN BUNGA	✓	
				4. TOKEN / PULSA	✓	
74	MANTIASA SERASI	MANTIASA	KEPULAUAN MERANTI	1. PERTERNAKAN SAPI	✓	
75	BUMDES BERKAT	MAINI	KEPULAUAN MERANTI	1. Matrial BANGUNAN	✓	
				2. BENSIN	✓	
76	TANJUNG MANDIRI	TANJUNG	KEPULAUAN MERANTI	1. WISATA TELAGA AIR MERAH	✓	
				2. BUNGA TANJUN (TAMAN)	✓	
				3. ATK/FOTOCOPY	✓	
				4. PENYEBERANGAN KEMPANG	✓	
77		MEKONG		1. ATK/FOTOCOPY	✓	

	MEKONG BESTARI		KEPULAUAN MERANTI	2. BENGKEL	✓	
				3. PONSEL	✓	
				4. KEMPANG	✓	
78	NAMBUS BESTARI	TJG DARUL TAKZIM	KEPULAUAN MERANTI	1. PERDAGANGAN	✓	
				2. PERTANIAN	✓	
				3. JASA	✓	
79	MAJU JAYA	BATANG MALAS	KEPULAUAN MERANTI	1. Matrial BANGUNAN	✓	
				2. SOUND SISTEM	✓	
				3. TENDA	✓	
80	BINA USAHA SEJATI	KUNDUR	KEPULAUAN MERANTI	1. PENGOLAHAN AIR BERSIH	✓	
				2. PERTANIAN	✓	
				3. UED-SP	✓	
				4. PENGOLAHAN JAHE	✓	
81	AL FAZZA	MENGGIKIP	KEPULAUAN MERANTI	1. ATK/FOTOCOPY	✓	
				2. Matrial BANGUNAN	✓	
82	GOGOK DARUSSALAM	GOGOK	KEPULAUAN MERANTI	1. KEPOK (Matrial BATU KERIKIL)	✓	
83	HARAPAN MAJU	TENAN	KEPULAUAN MERANTI	1. TERNAK LELE	✓	
				2. CUCIAN MOTOR	✓	
				3. HOME INDUSTRI	✓	
84	TANAH LEMBAH BERTUAH	TJG PERANAP	KEPULAUAN MERANTI	1. SEMBAKO	✓	
KECAMATAN RANGSANG BARAT						

85	USAHA JAYA	Bina Maju	KEPULAUAN MERANTI	1. UNIT Simpan Pinjam, 2. Jasa Percetakan 3. Jasa Penyewaan Perontok padi	✓	
86	LEMANG JAYA	Lemang	KEPULAUAN MERANTI	1. Unit Simpan Pinjam, 2. Jasa Penyewaan Kempang	✓	
87	PERMAI CIPTA MANDIRI	Permai	KEPULAUAN MERANTI	1. Pariwisata, 2. Perdagangan 3. Pertanian 4. Kelautan	✓	
88	BOKOR MANDIRI	Bokor	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan	✓	
89	ASTA LESTARI	Anak Setatah	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam, 2. Penyewaan Papang Bunga 3. Perdagangan 4. Pariwisata	✓	
90	KARYA BERSAMA	Melai	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan	✓	
91	MEKAR JAYA	Mekar Baru	KEPULAUAN MERANTI	1. Penyewaan Tenda 2. Perdagangan, 3. Peternakan 4. jasa Keuangan	✓	

92	BUMDES BERKAH	Telaga Baru	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam, 2.Pariwisata, 3. Penyewaan Prontok Padi 4. Mesin Molen 5.Perdagangan	✓	
93	BANTAR GEMILANG	Bantar	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam, 2.Kursus Komputer, 3.Jasa Penyewaan Kempang	✓	
94	SINAR SEJAHTERA	Sialang Pasung	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam. 2.Pengolahan Plastik, 3.Pariwisata 4. Perdagangan	✓	
95	SEGOMENG JAYA	Segomeng	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam, 2. Perdagangan 3. Pariwisata	✓	
96	SUMBER MAKMUR	Sungaicina	KEPULAUAN MERANTI	1. Simpan Pinjam 2. Jasa Percetakan	✓	
JUMLAH BUMDES					93 Unit	3 Unit

Sumber Data : Olahan DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan indikator sasaran salah satunya adalah Persentase Lembaga Desa Aktif dimana yang menjadi lembaga desa yang dimaksud adalah Peran dari BUMDES.

BUMDEs mempunyai pengertian sebagai Lembaga Usaha Desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDES, BUMDES sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Sehingga penetapan BUMDES yang aktif terus digalakkan dalam rangka mendukung perekonomian di desa dan juga kemandirian di desa.

Untuk Tabel 3.23 diatas merupakan data BUMDES pada Tahun 2018, dimana bisa kita lihat terjadi kenaikan jumlah BUMDES yang aktif sebanyak 51 Unit BUMDES, sementara untuk Tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan dalam hal BUMDES yang terbentuk, dimana setiap Desa diwajibkan memiliki BUMDES dengan hadirnya Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun porsi keuangan dibagi selain untuk pembangunan ada juga untuk penyertaan modal ke BUMDES di setiap desa dengan nominal sejumlah Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tentunya hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintahan Desa, dimana Seluruh desa sudah memiliki BUMDES yang nantinya akan membantu perekonomian Desa melalui Pendapatan Asli Desa. Adapun total Desa yang memiliki BUMDES aktif pada tahun 2019 berjumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bumdes. Selain itu juga Aktif atau tidaknya BUMDES tentu saja didukung beberapa faktor, diantaranya komitmen pimpinan dan seluruh staf yang membidangi lembaga desa, khususnya tentang BUMDES, dan lagi untuk BUMDES didukung dengan adanya pendampingan yang secara terus menerus oleh Pendamping BUMDES, dimana para pendamping bertugas sebagai fasilitator dalam perkembangan dan pelaksanaan BUMDES yang ada di Seluruh Desa Se Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Pada tahun 2018 realisasi indikator sasaran Persentase lembaga kemasyarakatan aktif memiliki realisasi sebesar 100 %, indikator ini memenuhi bahkan melebihi target yang ditentukan sebesar 75 %. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti mampu melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu dari target sebesar 80 % dengan realisasi mencapai 100 %. Sedangkan capaian kinerjanya pada tahun tahun 2018 mencapai 133,3 %, untuk tahun 2019 capaian kinerja mencapai 125 %. Dapat disimpulkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif tahun 2019 pencapaiannya melebihi dari target yang ditentukan, hal yang sama dengan tahun 2018 dan juga telah terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik jika dilihat dari besaran nilai persentasenya.

Untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif, dapat dilihat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pemerintahan Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini PKK, Adapun yang menjadi formulasi penghitungan capaian kinerja untuk Lembaga Kemasyarakatan aktif dilihat pada jumlah Lembaga Kemasyarkatan aktif tahun ini .

Berikut Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif Se Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel : 3.17

Lembaga Kemasyarakatan Aktif PKK Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Total PKK	Kepemilikan SK PKK	Jumlah PKK Aktif	PKK Aktif
1	2	3	4	5	6	(6=6/4*100)
1	Tebing Tinggi	5	5	Ada	5	100
2	Tebing Tinggi Barat	14	14	Ada	14	100
3	Tebing Tinggi Timur	10	10	Ada	10	100
4	Rangsang	14	14	Ada	14	100
5	Rangsang Barat	12	12	Ada	12	100
6	Rangsang Pesisir	12	12	Ada	12	100
7	Merbau	10	10	Ada	10	100
8	Pulau Merbau	11	11	Ada	11	100
9	Tasik Putri Puyu	10	10	Ada	10	100
TOTAL					96	100

Sumber Data : Dinas BPMPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Tabel : 3.18
Lembaga Kemasyarakatan Aktif PKK Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Total PKK	Kepemilikan SK PKK	Jumlah PKK Aktif	PKK Aktif
1	2	3	4	5	6	(6=6/4*100)
1	Tebing Tinggi	5	5	Ada	5	100
2	Tebing Tinggi Barat	14	14	Ada	14	100
3	Tebing Tinggi Timur	10	10	Ada	10	100
4	Rangsang	14	14	Ada	14	100
5	Rangsang Barat	12	12	Ada	12	100
6	Rangsang Pesisir	12	12	Ada	12	100
7	Merbau	10	10	Ada	10	100
8	Pulau Merbau	11	11	Ada	11	100
9	Tasik Putri Puyu	10	10	Ada	10	100
TOTAL					96	100

Sumber Data : Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Lembaga Kemasyarakatan desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, dalam hal ini PKK juga merupakan lembaga yang diperlukan khususnya dalam menciptakan kreasi dan inovasi di pemerintahan desa melalui program-program pokok PKK yang tertuang dalam AD ART nya, selain itu terpilihnya PKK sebagai indikator dikarenakan PKK merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja yang luas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat desa, PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki POKJA (Kelompok Kerja), selain itu juga salah satu program dan kegiatan yang ada di Dinas PMD mengarah pada peningkatan peran PKK dalam pembangunan masyarakat desa.

Perbandingan kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 berdasarkan kedua indikator sasaran diatas lebih detailnya dapat dijelaskan bahwa keaktifan PKK pada tahun 2018 dan tahun 2019 tetap 100 %. Ini berarti bahwa PKK terus maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra dari pemerintah desa. Pada tahun 2018 keaktifan PKK mencapai 100 %, ini berarti bahwa PKK mampu melaksanakan program-program baik itu berbentuk kegiatan maupun berbentuk laporan hasil kegiatan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dimana keaktifan PKK yang dibuktikan melalui penerbitan Surat Keputusan PKK di setiap desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Target Indikator Sasaran berjumlah 7 (Tujuh) Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan TTG dengan Realisasi sebesar 8 (Delapan) Kelompok yang terbentuk, sehingga capaian adalah sebesar 114,2 %. Pada Tahun 2019 Dinas PMD menambah jumlah angka kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG, dengan penambahan 3 (Tiga) Kelompok sehingga tahun ini target kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sebanyak 11 (sebelas) kelompok dengan

target sebesar 9 (Sembilan) Kelompok dan realisasi sebanyak 11 (Sebelas) Kelompok, dengan capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 122,2 %.

Pemanfaatan TTG ini dimaksudkan sebagai suatu langkah strategi dalam penyebarluasan informasi berbagai jenis teknologi tepat guna yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, meningkatnya pendapatan rumah tangga sekaligus memberikan kemampuan hidup lebih mandiri.

Dasar Hukum pelaksanaan TTG adalah instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan TTG, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

TABEL : 3.19
REKAPITULASI WARUNG TEKNOLOGI/POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA WARTEK/POSYANTEK DESA	SEKRETARIAT	PENGURUS	NO SK PENGUKUHAN
				NAMA	
1	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR	KANTOR DESA	KETUA: MURISKA, A.Md WAKIL: ALIF KURNIAWAN BENDAHARA: EDI KURNIAWAN	NO. 15.a/DAT/SK-WARTEK/I/2017
2	TEBING TINGGI	SESAP	KANTOR DESA	KETUA: NURSODIK WAKIL: ALFIANTO BENDAHARA: ASENG PRATAMA	NO. 12 TAHUN 2017
3	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	KANTOR DESA	KETUA: AHMAD AFANDI WAKIL: MUKHAIMIN BENDAHARA: LIANI	NO. 25/SK/KD-TS/2016
4	RANGSANG	DWI TUNGGAL	KANTOR DESA	KETUA: MHD. SYARIFUDIN WAKIL: ISMAWAN BENDAHARA: ENIK UMMUROSIDAH	NO. 25 TAHUN 2016
5	TEBING TINGGI	ALAH AIR	KANTOR DESA	KETUA: SYAIFUDDIN WAKIL: BAMBANG. R BENDAHARA: KOSINGAH	NO. 13 TAHUN 2016
6	RANGSANG BARAT	BANTAR	KANTOR DESA	KETUA : NURWAHIDIN WAKIL : SRI HANDAYANI	NO. 21 TAHUN 2018

				BENDAHARA : SARTIKA	
7	TEBING TINGGI BARAT	ALAI	KANTOR DESA	KETUA :HARI	NO. 22 TAHUN 2018
				WAKIL : YESSIE	
				BENDAHARA : TITIN	
8	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	KANTOR DESA	KETUA: AHMAD AFANDI	NO. 25/SK/KD-TS/2018
				WAKIL: MUKHAIMIN	
				BENDAHARA: LIANI	

Sumber Data : Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

TABEL : 3.20
REKAPITULASI WARUNG TEKNOLOGI/POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA WARTEK/POSYANTEK DESA	SEKRETARIAT	PENGURUS	NO SK PENGUKUHAN
				NAMA	
1	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR	KANTOR DESA	KETUA: MURISKA, A.Md	NO. 15.a/DAT/SK-WARTEK/I/2017
				WAKIL: ALIF KURNIAWAN	
				BENDAHARA: EDI KURNIAWAN	
2	TEBING TINGGI	SESAP	KANTOR DESA	KETUA: NURSODIK	NO. 12 TAHUN 2017
				WAKIL: ALFIANTO	
				BENDAHARA: ASENG PRATAMA	
3	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	KANTOR DESA	KETUA: AHMAD AFANDI	NO. 25/SK/KD-TS/2016
				WAKIL: MUKHAIMIN	
				BENDAHARA: LIANI	
4	RANGSANG	DWI TUNGGAL	KANTOR DESA	KETUA: MHD. SYARIFUDIN	NO. 25 TAHUN 2016
				WAKIL: ISMAWAN	
				BENDAHARA: ENIK UMMUROSIDAH	
5	TEBING TINGGI	ALAH AIR	KANTOR DESA	KETUA: SYAIFUDDIN	NO. 13 TAHUN 2016
				WAKIL: BAMBANG. R	
				BENDAHARA: KOSINGAH	

6	RANGSANG BARAT	BANTAR	KANTOR DESA	KETUA : NURWAHIDIN	NO. 21 TAHUN 2018
				WAKIL : SRI HANDAYANI	
				BENDAHARA : SARTIKA	
7	TEBING TINGGI BARAT	ALAI	KANTOR DESA	KETUA :HARI	NO. 22 TAHUN 2018
				WAKIL : YESSIE	
				BENDAHARA : TITIN	
8	RANGSANG	TANJUNG SAMAK	KANTOR DESA	KETUA: AHMAD AFANDI	NO. 25/SK/KD-TS/2018
				WAKIL: MUKHAIMIN	
				BENDAHARA: LIANI	
9	RANGSANG PESISIR	DESA SENDAUR	KANTOR DESA		
10	MERBAU	MEKAR SARI	KANTOR DESA		
11	PULAU MERBAU	BARAN MELINTANG	KANTOR DESA		

Pencapaian kinerja indikator sasaran tersebut bisa dikatakan bahwa Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 telah berhasil membentuk sebanyak 11 (Sebelas) kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG.

TTG sendiri memiliki tujuan untuk :

1. Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan produktivitas dan produksi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Mempercepat pemulihan ekonomi produktif masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan lapangan usaha
3. Mendorong tumbuhnya motivasi di bidang teknologi yang ramah lingkungan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1

Pencapaian sasaran ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1

INDIKATOR		SATUAN	Tahun 2019		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Desa Dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu	Persentase	85 %	100 %	118 %	95 %	105,26 %
	1.1 Tertib Aturan dan Ketentuan	Persentase	85 %	100 %	118 %	95 %	105,26 %
	1.2 Tepat waktu : tidak melebihi batas	Persentase	85 %	100 %	118 %	95 %	105,26 %

	waktu yang ditentukan						
2	Persentase Lembaga Desa Aktif	Persentase	80 %	96,88 %	121,1 %	90 %	107,64 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persentase	80 %	100 %	125 %	90 %	111,11 %
4	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kelompok	9	11	122,2 %	13	84,61 %

Sumber Data :Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PMD periode 2016 – 2021, maka realisasi indikator Kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu tahun 2019 sebesar 100 % dengan capaian 118 %. Dibanding dengan target akhir periode renstra sebesar 95 %, capaian pada tahun ini adalah sebesar 105,26 %. Dengan capaian pada tahun 2019 ini , Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah bisa melebihi target akhir renstra. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan indikator dapat dikategorikan sangat baik.

Untuk indikator kedua yaitu persentase lembaga desa aktif apabila dibandingkan dengan target akhir renstra DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2016 – 2021, maka capaian indikator persentase lembaga desa aktif tahun 2019 dengan realisasi sebesar 96,88 % mencapai 121,1 %. Dibanding dengan target akhir periode Renstra dengan target yang ditetapkan sebesar 90 % capaian pada tahun ini adalah sebesar 107,64 %.

Dengan capaian pada tahun ini tentunya Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah bias melebihi target akhir renstra. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan sangat baik.

Untuk indikator ketiga yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif, apabila dibandingkan dengan target akhir tahun renstra Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2016 – 2021, maka realisasi indikatornya tahun 2018

dengan realisasi sebesar 100 % mencapai 125 %. Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar 111,11 % capaian pada tahun ini adalah sebesar 125 %. Dengan capaian pada tahun ini tentunya Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus meningkatkan capaian realisasi kinerja indikator terhadap target yang telah ditetapkan sampai akhir periode Renstra 2016 – 2021. Jika dapat memenuhi target sesuai dengan renstra tentunya dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan sangat baik.

Untuk indikator keempat, yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan TTG, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 – 2021, maka realisasi indikator kinerja jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG Tahun 2019 sebanyak 11 Kelompok. Capaian kinerja sebesar 122,2 %. Didanding dengan target akhir periode renstra target kelompok sebesar 13 Kelompok, capaian pada tahun ini adalah sebesar 84,61 %.

Dengan capaian pada tahun ini dapat dikatakan bahwa kinerja jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG adalah baik dan memenuhi target capaian kinerja tahun ini, sementara untuk capaian akhir periode Renstra masih memiliki target untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebanyak 13 kelompok.

Capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan yaitu : Pelatihan BPD Se Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemantapan SISKEUDES, Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Sebagai Administrator Desa, Rakor Penyusunan Penganggaran Desa, Pelatihan Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Fungsi Kepala Desa, Pembinaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIPADES. Untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu Pendampingan dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa, Pendampingan Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa Tingkat Kabupaten, Bimtek Penerapan TTG dan Posyantek dalam mewujudkan kewirausahaan.. Untuk Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdiri dari Monitoring dan Evaluasi BUMDEs, Rakor dan Sosialisasi BUMDES

Se Kabupaten Kepulauan Meranti, Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDES, Peningkatan Kapasitas pendamping desa dalam mewujudkan Desa MAndiri Berbasis Ekonomi.

Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur dengan indikator kinerja utama Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki 4 (empat) program dengan 18 (Delapan Belas) kegiatan sebagai penunjang capaian sasaran kedua ini.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1.	Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Pelatihan BPD Se Kabupaten Kepulauan Meranti	82.290.000	82.290.000	Meningkatkan peran BPD Se Kabupaten Kepulauan Meranti	Menunjang
		2. Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	249.800.000	240.000.000	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Menunjang
		3. Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Sebagai Administrator Desa	91.890.000	91.890.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	Menunjang
		4. Pemantapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	101.350.000	101.350.000	Desa yang mahir dalam pengelolaan Keuangan	Menunjang
		5. Rakor Penyusunan Penganggaran Desa	90.950.000	90.950.000	Terlaksananya Rakor Penyusunan Penganggaran Desa	Menunjang
		6. Pembinaan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	394.351.000	394.341.000	Melaksanakan Pembinaan dan pemilihan Kepala Desa/BPD	Menunjang
		7. Pelatihan Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kinerja dan fungsi Kepala Desa	223.620.000	213.620.000	Meningkatkan Capacity Building Kepala Desa	Menunjang

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

		8. Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa)	148.480.000	0	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi SIPADES	Menunjang
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Monitoring dan Evaluasi BUMDES	200.000.000	120.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BUMDES di Setiap Kecamatan	Menunjang
		2. Rapat Koordinasi dalam Sosialisasi BUMDes Se Kabupaten	92.340.000	92.340.000	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BUMDES	Menunjang
		3. Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes	149.243.600	149.243.600	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan	Menunjang
		4. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi	135.000.000	86.656.400	Meningkatkan SDM Pendamping Desa	Menunjang
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	1. Peningkatan Peran PKK	298.250.000	260.715.400	Pelaksanaan kegiatan PKK	Menunjang
4.	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Pendampingan dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa	33.430.000	33.430.000	Terlaksananya Pendampingan dan Pembentukan Posyantek Desa	Menunjang
		2. Pendampingan Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa	47.780.000	47.780.000	Terlaksananya Pendampingan Inovasi Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa	Menunjang

		3. Penyelenggaraan Lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa Tingkat Kabupaten	48.700.000	48.700.000	Pelaksanaan Lomba Posyantek Desa	
		4. Bimtek Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Posyantek dalam menwujudkan Kewirausahaan	135.000.000	0	Menerapkan Teknologi TTG dalam Pembentukan Posyantek.	Menunjang
5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Penyelenggaraan BBGRM Tingkat Kabupaten	53.675.600	53.675.600	Penyelenggaraan BBGRM di Kabupaten Kepulauan Meranti	
		2. Pelatihan Peningkatan Peran Kader POSYANDU	70.325.000	66.250.000	Terlaksananya pelatihan peningkatan kader Posyandu	

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sasaran 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dalam bidangnya
2. Sarana dan prasarana yang baik
3. Pola Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar pelaku desa dan paaratur desa dengan DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh aparatur pedesaan
5. Ketersediaan Sumber Daya Alam untuk menciptakan alat TTG (Teknologi Tepat Guna)
6. Regulasi dari Pemerintah Pusat tentang Pelaksanaan TTG

Faktor Penghambat :

Adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak pada pencapaian program dan kegiatan untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.23
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan APBDes Tertib dan Tepat Waktu		%	85	100	118	1. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.382.731.000	1.214.441.000	87.82
		1.1	Tertib : Tertib Aturan dan Ketentuan	%	85	100	118	2. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
		1.2	Tepat Waktu : Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	%	85	100	118	3. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
		Persentase Lembaga Desa Aktif	%	80	96,88	121,1	Program Pengembangan lembaga ekonomi desa	576.583.600	389.330.000	67.52	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80	100	125	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	298.250.000	260.715.400	87.41	
		Jumlah Masyarakat Kelompok yang memanfaatkan TTG	Kelompok	9	11	122,2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa	124.000.600	119.925.600	96.71	
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	264.910.000	129.910.000	49.03	
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					120,38	TOTAL PER SASARAN	2.646.475.200	2.114.322.000	77.69
TINGKAT EFESIENSI 42,69 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 154,94 %											

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.23 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama (1) adalah 120,38 %, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori sangat baik. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efesiensi 42,69 %, menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan persentase realisasi keuangan . Selaras dengan tingkat efektifitas yaitu 154,94 %, menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Adapun capaian masing-masing indikator kedua dan ketiga adalah sebagai berikut :

a) Persentase Lembaga Desa Aktif

Untuk mengukur derajat peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, salah satu indikator yang digunakan adalah melihat persentase kenaikan lembaga desa aktif.

Lembaga Desa merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain yang merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Cara Perhitungan : Jumlah Lembaga Desa (BUMDES) Aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga Desa (BUMDES) seluruhnya yang dibentuk x 100 %.

Untuk indikator kinerja Lembaga Desa Aktif pada tahun 2019 ini 80% realisasinya adalah 96,88 % dengan capaian kinerja sebesar 121,1 % hal ini berarti capaian kinerja untuk Lembaga Desa Aktif melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah BUMDES yang sudah terbentuk sebanyak 96 Unit BUMDES dan yang aktif sebanyak 93 Unit BUMDES. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah ditujukan untuk meningkatkan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

b) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Untuk mengukur persentase lembaga kemasyarakatan aktif dilihat pada peran PKK, dimana PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada

masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Cara Penghitungan : Jumlah PKK Aktif di Desa dibagi dengan Jumlah PKK keseluruhan yang ada di Desa.

Untuk indikator kinerja Lembaga Kemasyarakatan Aktif terealisasi sebesar 100 %, hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80 %.

Adapun Jumlah PKK adalah sebanyak 96 Kelompok dari 96 Desa, ini berarti bahwa setiap desa memiliki kelompok PKK yang aktif dalam menjalankan fungsinya, hal ini dibuktikan dengan SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan oleh Kepala Desa.

- c) Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG), pada tahun 2019 ini Kelompok TTG yang ditargetkan sebanyak 9 kelompok, sementara realisasi sebesar 11 kelompok, hal ini melebihi target yang ditentukan, dengan capain kinerja sebesar 122,2 %.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa, serta jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan solusi/perbaikan sebagai berikut :

Yaitu : Dalam rangka merealisasikan anggaran yang telah direncanakan perlu adanya kepastian anggaran pada OPD untuk bisa melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, hal ini akan mempengaruhi realisasi anggaran dan kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, dimasa yang akan datang ada solusi/perbaikan yang dapat direkomendasikan :

1. Perlu peningkatan sarana/prasarana pelayanan publik
2. Perlu penambahan anggaran dan sumber daya aparatur

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor Pendukung :

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa dan merupakan kegiatan yang memang diperlukan dalam pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber daya yang ada pada pemerintahan desa

- Faktor Penghambat :

Terjadinya rasionalisasi anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini menyebabkan anggaran pada OPD dikurangi. Ini terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana untuk program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dan program peningkatan kapasitas kelembagaan desa terdapat sebanyak dua (2) Kegiatan yang di rasionalisasikan, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti disusunlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan. Disamping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat desa, dimana pelayanan yang diberikan ini masih memerlukan perbaikan dan dapat juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap Aparatur Desa maupun masyarakat desa yang datang ke Dinas PMD yang dilakukan kepada 150 Orang Aparatur Desa dan Masyarakat Desa, mulai dari Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lain-lain.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi 12 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun tentang Pedoman

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Sebagai Berikut :

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
11. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kategori nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari 12 unsur pelayanan yang dinilai dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu kategori A dinyatakan sangat baik, kategori B dinyatakan baik, kategori C dinyatakan kurang baik dan kategori D dinyatakan tidak baik. Nilai indeks dari masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.24
Kategori Nilai IKM

NO	INDEKS	KATEGORI	KETERANGAN
1	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
2	62,51 – 81,25	B	Baik
3	43,75 – 62,50	C	Kurang Baik
4	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik

Sumber : Keputusan MENPAN Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 3.9 diatas untuk hasil IKM pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2019 mencapai angka 80,00 % di survey dari sejumlah 150 Responden meliputi seluruh Aparatur Desa yang ada dan menggunakan jasa pelayanan dari Dinas PMD. Untuk indikator ini jika kita lihat tentunya sesuai dengan capaian yang memang menjadi target dari IKM Tahun 2019 sebesar 80 %, dengan realisasi sebesar 80 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Capaian indikator untuk mencapai sasaran strategis kedua serta perbandingan kinerja untuk sasaran 2 akan disajikan berikut ini :

Perbandingan Kinerja

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2019

Untuk mengetahui indikator kinerja utama berhasil atau tidak dapat dilihat dari realisasinya. Realisasi indikator kinerja utama sasaran 2 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	80 %	80 %	100 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.25 diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan pada awal Tahun 2019 ditargetkan sebesar 80 %, terealisasi sebesar 80 %, sehingga capaian untuk IKM DPMD Tahun 2019 sebesar 100 %, nilai 80 % ini dikategorikan kedalam nilai Sangat Baik.

Untuk sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur ini dapat dikatakan memenuhi target yang memang sudah ditetapkan, kedepannya DPMD memiliki peningkatan target yang memang juga ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas PMD.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Realisasi Kinerja serta Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	80 %	106,6 %	80 %	80 %	100 %
-----------------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	--------------

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Dari Tabel 3.26 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75 %, indikator ini melebihi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian yang didapat sebesar 106,6 %, sementara untuk tahun 2019 persentase perolehan nilai IKM mengalami kenaikan dalam penetapan target sebesar 5 % menjadi 80 % dan realisasinya juga mencapai 80 %, sehingga capaian IKM untuk tahun 2019 sebesar 100 %. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi peningkatan dalam target yang ditetapkan dan realisasi tidak melebihi dengan target yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan pencapaian target.

Penghitungan IKM diperoleh dari Survey yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap 150 orang responden, yang melibatkan apartur desa, maupun lembaga desa yang datang dan menerima pelayanan dari Dinas PMD. Berikut olahan hasil survey IKM DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Tabel 3.27
Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2018

NO	UNSUR	NILAI UNSUR	NILAI PENIMBANG	HASIL (NILAI UNSUR X 0,083)
1	1	2,535	0,083	0,210405
2	2	2,491	0,083	0,206753
3	3	2,694	0,083	0,223602
4	4	2,5484	0,083	0,2115172
5	5	2,695	0,083	0,223685
6	6	2,76	0,083	0,22908
7	7	2,52	0,083	0,20916
8	8	2,48	0,083	0,20584
9	9	2,6364	0,083	0,2188212
10	10	2,713	0,083	0,225179
11	11	2,6064	0,083	0,2163312
12	12	2,6502	0,083	0,2199666
NILAI INDEKS				2,6003402
NILAI IKM (NILAI INDEKS X 25)				80 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Penghitungan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri PAN Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dimana Dinas PMD Pada Tahun 2018 telah melakukan survey dengan berdasarkan pedoman yang ada. Untuk tahun 2018 seperti pada Tabel 3.17 diatas dilakukan dengan perolehan nilai penimbang sebesar 0,083 dan nilai unsur dari 12 Pertanyaan sebanyak 12 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden, sehingga didapat nilai IKM pada tahun 2018 untuk Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 80 %.

Tabel 3.28
Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2019

NO	UNSUR	NILAI UNSUR	NILAI PENIMBANG	HASIL (NILAI UNSUR X 0,083)
1	1	2,6436	0,083	0,2194188
2	2	2,635	0,083	0,218705
3	3	2,7522	0,083	0,2284326
4	4	2,8262	0,083	0,2345746
5	5	2,8852	0,083	0,2394716
6	6	2,8736	0,083	0,2385088
7	7	2,7044	0,083	0,2244652
8	8	2,9016	0,083	0,2408328
9	9	2,8052	0,083	0,2328316
10	10	2,9888	0,083	0,2480704
11	11	2,7894	0,083	0,2315202
12	12	2,9318	0,083	0,2433394
NILAI INDEKS				2,800171
NILAI IKM (NILAI INDEKS X 25)				80 %

Sumber : Olahan Data Dinas PMD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2019

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2018 adalah “Baik”, pada Tahun 2018, diperoleh dari hasil survey IKM Kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal yang sama terjadi juga pada tahun 2019 dengan target IKM sebesar 80 % dan capaian mencapai 100 %, artinya IKM di Tahun 2018 terealisasi sesuai dengan target.

Capaian kinerja IKM Tahun 2018 sebesar 100 % ini dipengaruhi oleh :

- a. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kinerja Dinas PMD yang merupakan tempat koordinasi pelaksanaan pemerintahan di Desa mulai ada perubahan dengan dilakukannya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkala di tiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dimaksimalkan untuk dilakukan dalam rangka memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada aparatur pemerintahan desa.
- c. Pengembangan SDM ASN Dinas PMD terus dilakukan untuk menambah profesionalisme dalam memuaskan pelanggan yang dalam hal ini konteksnya adalah Desa beserta aparatur desa.

Dengan tersedianya data IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam pelayanan.
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1

Pencapaian sasaran kedua ini dapat dianalisis dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Analisis Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019		%	Target 2021	%
		Target	Realisasi		Target	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	80 %	80 %	100 %	90 %	88,88 %

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaen Kepulauan Meranti Tahun 2019

Untuk indikator kelima, yaitu Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 – 2021, maka realisasi indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 memiliki target IKM sebesar 80 % dengan realisasi sebesar 80 % sehingga capaiannya adalah 100 %. Didanding dengan target akhir periode renstra target IKM sebesar 90 % , capaian pada tahun ini adalah sebesar 88,88 %.

Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor,

penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tenaga honorer, pengadaan kendaraan dinas / operasional, pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor, pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor, Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan, penyusunan laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Laporan Pertanggungjawaban, Penyusunan Laporan Prognosis, adapun output program dan kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pelayanan publik dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.30

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/Kurang
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.890.000	10.890.000		Menunjang
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.050.000	40.631.726		Menunjang
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional	52.750.000	52.567.500		Menunjang
		4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor	122.200.000	122.200.000		Menunjang
		5. Penyediaan alat Tulis Kantor	84.622.500	84.612.020		Menunjang
		6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	34.356.000	13.480.000		Menunjang
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.142.121	6.150.000		Menunjang
		8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	18.000.000		Menunjang
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	506.210.720	360.243.299		Menunjang
		10. Penyediaan jasa keamanan kantor	100.800.000	111.700.000		Menunjang

		11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	115.200.000	49.300.000		Menunjang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.499.000	28.499.000		
		2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	75.335.000	74.920.000		Menunjang
		3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000	7.000.000		Menunjang
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	4.500.000		Menunjang
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen SAKIP	17.700.000	17.700.000		Menunjang
		2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.350.000	15.350.000		Menunjang
		3. Penyusunan Dokumen SPIP	14.400.000	14.400.000		Menunjang

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dalam bidangnya
2. Sarana dan prasarana yang baik

Faktor Penghambat :

Adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas fasilitas teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.31

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	80	100	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.092.221.341	1.085.438.446	99.37
							2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	110.834.000	110.419.000	99.62
							3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.500.000	4.500.000	100
							4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.450.000	47.450.000	100
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR				100	TOTAL PER SASARAN	1.255.005.341	1.247.807.446	99.74
TINGKAT EFESIENSI 0.26%										
TINGKAT EFEKTIFITAS 100.26 %										

Sumber Data : Olahan Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.31 diatas menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran kedua (2) adalah 99.74 %, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori sangat baik, adapun rumusan persen didapatkan dengan membagikan total persen (%) kinerja dengan jumlah persen keuangan.

Artinya pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tingkat efesiensi sebesar 0,26 % menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur dengan persentase realisasi keuangan. Selaras dengan tingkat efektifitas 100.26 % menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, dimasa yang akan datang ada solusi / perbaikan yang dapat direkomendasikan :

1. Perlu peningkatan sarana / prasarana pelayanan publik
2. Perlu penambahan anggaran dan sumber daya aparatur

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pelayanan aparatur disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung :

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa dan merupakan kegiatan yang memang diperlukan dalam pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber daya yang ada pada pemerintahan desa.

b. Faktor Penghambat

Terjadinya rasionalisasi anggaran di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini menyebabkan anggaran pada OPD dikurangi. Ini terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian kinerja dan anggaran		Ket
				4	5	6	7	8=(6/4)	9=(7/5)	
				Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kelengkapan Administrasi Perkantoran			1.092.221.341		1.091.438.446			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan perangko	Bulan	12	10.890.000	12	10.890.000	100	100	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan listrik	Tagihan Bulanan Telepon,air,Listrik,dan Internet	Bulan	12	46.050.000	12	46.631.726	100	88.23	
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Bulan	12	52.750.000	12	52.567.500	100	99.65	
04	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Tenaga Kebersihan	Bulan	12	122.200.000	12	122.200.000	100	100	
05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK Kantor DPMD	Bulan	12	84.622.500	12	84.612.020	100	99.99	
06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Hasil Cetak dan pengadaan	Bulan	12	34.356.000	12	34.256.000	100	99.71	
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat-alat listrik/penerangan kantor	Bulan	12	7.142.121	12	6.300.000	100	88.21	
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undang	Tagihan Langganan Koran/majalah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	100	100	
09	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	506.210.720	12	505.981.200	100	99,95	

10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tenaga Keamanan Kantor	Bulan	12	100.800.000	12	100.800.000	100	100	
11	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Kegiatan	1	115.200.000	1	115.200.000	100	100	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur			19.600.000		19.600.000,00			
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	6	28.499.000	6	28.499.000	100	0	
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gudung kantor	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan kantor	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	100	100	
03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Melakukan Rehabilitasi Sedang/Berat terhadap gedung kantor	Unit	1	74.920.000	1	74.920.000	100	99.45	
3	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Apartur			121.770.100		120.990.100			
01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Apartur Pemerintah mengikuti bimtek	kali	1	4.500.000	15	4.500.000	100	100	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			80.250.000		80.250.000			
01	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis SKPD	Dokumen	1	15.350.000	1	15.350.000	100	100	
02	Penyusunan Dokumen SAKIP	Terlaksananya Penyusunan SAKIP	Dokumen	1	17.700.000	1	17.700.000	100	100	
03	Penyusunan Dokumen SPIP OPD	Terlaksananya Penyusunan SPIP	Dokumen	1	14.400.000	1	14.400.000	100	100	

5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan			243.828.500		233.715.000			
01	Pendampingan dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa	Pelaksanaan Pendampingan TTG dan pembentukan Kelompok TTG	Kegiatan	1	33.430.000	1	33.430.000	100	100	
02	Pendampingan Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa	Pelaksanaan Pendampingan Inovasi Arah dan Pedoman Pembangunan Desa	Kegiatan	1	47.780.000	1	47.780.000	100	100	
03	Penyelenggaraan Lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa Tingkat Kabupaten	Pelaksanaan lomba TTG Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	48.700.000	1	48.700.000	100	100	
04	Bimtek Penerapan TTG dan Posyantek dalam mewujudkan kewirausahaan	Terlaksananya Bimtek Penerapan TTG dan Posyantek	Kegiatan	1	135.000.000	1	-	0	0	
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Pedesaan			391.530.000		389.330.000			
01	Monitoring dan Evaluasi BUMdes	Pengadaan Monitoring dan Evaluasi disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	200.000.000	1	120.000.000	100	60	
02	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BUMDes Se Kabupaten	Pengadaan Monitoring dan Evaluasi disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	92.340.000	1	92.340.000	100	100	
03	Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Bumdes	Kegiatan	1	149.243.600	1	149.243.600	100	100	
04	Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi	Pelaksanaan Pendampingan Desa	Kegiatan	1	135.000.000	1	86.656.400	100	64.19	

7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			124.000.600		124.000.600			
01	Penyelenggaraan BBGRM Tingkat Kabupaten	Terlaksananya penyelenggaraan BBGRM	Kegiatan	1	53.675.600	1	53.675.600	100	100	
02	Pelatihan Peningkatan Peran Kader POSYANDU	Terlaksananya Peningkatan Peran Kader Posyandu	Kegiatan	1	70.325.000	1	66.250.000	100	94.21	
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			1.028.870.000		1.028.440.000			
01	Pelatihan BPD Se Kabupaten	Meningkatkan Peran BPD SE-kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	82.290.000	1	82.290.000	100	100	
02	Monitoring Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya Monitoring pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kegiatan	1	249.800.000	1	240.000.000	100	96.08	
03	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa sebagai Administrator Desa	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	Kegiatan	1	91.890.000	1	91.890.000	100	100	
04	Pemantapan SISKEUDES	Pelaksanaan Pelatihan SISKEUDES	Kegiatan	1	101.350.000	1	101.350.000	100	100	
05	Rakor Penyusunan Penganggaran Desa	Terlaksananya Rakor Penyusunan penganggaran desa	Kegiatan	1	90.950.000	1	90.950.000	100	100	
06	Pembinaan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa	Melaksanakan Pembinaan dan pemilihan kepala desa/BPD	Kegiatan	1	394.351.000	1	394.341.000	100	100	
07	Pelatihan Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan fungsi Kepala Desa	Pelatihan Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan fungsi Kepala Desa	Kegiatan	1	223.620.000	1	213.620.000	100	95.53	
08	Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi SIPADES	Pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIPADES	Kegiatan	1	148.480.000	1	0	0	0	

9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Desa			298.250.000		260.715.400			
01	Peningkatan Peran PKK	Pelaksanaan keg PKK	Kegiatan	1	298.250.000	1	260.715.400	100	87.42	
Total					3.901.480.541		3.421.039.446			
Rata-Rata Capaian Kinerja								100%	87.69 %	

Sumber Data : LKPJ Dinas PMD Tahun 2019

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian kinerja dan anggaran		Ket
				4	5	6	7	8=(6/4)	9=(7/5)	
				Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya kelengkapan Administrasi Perkantoran			844.772.571		849.403.284			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan perangko	Bulan	12	5.010.000	12	5.010.000	100	100	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan listrik	Tagihan Bulanan Telepon,air,Listrik,dan Internet	Bulan	12	36.700.000	12	36.387.985	100	99,15	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Bulan	12	44.567.560	12	44.550.000	100	1,00	
08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Tenaga Kebersihan	Bulan	12	128.300.000	12	128.300.000	100	100	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK Kantor DPMD	Bulan	12	76.282.000	12	76.282.000	100	100	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Hasil Cetak dan pengadaan	Bulan	12	13.480.000	12	13.480.000	100	100	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat-alat listrik/penerangan kantor	Bulan	12	6.150.000	12	6.150.000	100	100	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undang	Tagihan Langganan Koran/majalah	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	100	100	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	360.293.011	12	360.243.299	100	99,99	

19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tenaga Keamanan Kantor	Bulan	12	111.700.000	12	111.700.000	100	100	
20	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Kegiatan	1	49.300.000	1	49.300.000	100	100	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur			19.600.000		19.600.000,00			
005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	0	1	0	100	0	
011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Barang Belanja Modal selama 12 bulan	Unit	47	19.100.000	47	19.100.000	100	100	
028	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gudung kantor	Melakukan Pemeliharaan Rutin terhadap gedung kantor	Unit	18	500.000	18	500.000	100	100	
164	Pembangunan Ruang Rapat Dinas PMD	Tersedianya Ruang Rapat PMD	Unit	1	0	1	0	100	0	
5	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Apartur			121.770.100		120.990.100			
059	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Apartur Pemerintah mengikuti bimtek	kali	15	63.180.000	15	62.400.000	100	98,77	
126	Bimbingan Teknis Adminitrasi Kantor	Jumlah Adminstrasi kantor yang mengikuti bimtek	kali	15	58.590.100	15	58.590.100	100	100	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			80.250.000		80.250.000			
03	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis SKPD	Dokumen	1	5.750.000	1	5.750.000	100	100	

61	Penyusunan Dokumen SAKIP	Terlaksananya Penyusunan SAKIP	Dokumen	1	49.500.000	1	49.500.000	100	100	
62	Penyusunan Dokumen SPIP OPD	Terlaksananya Penyusunan SPIP	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100	
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perdesaan			243.828.500		233.715.000			
04	Pendamping TTG dan Pembentukan kelompok TTG	Pelaksanaan Pendampingan TTG dan pembentukan Kelompok TTG	Kegiatan	1	75.000.000	1	68.400.000	100	91,2	
09	Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	Pelaksanaan TTG di 2 lokasi tingkat nasional dan provinsi	Kegiatan	1	77.488.500	1	74.375.000	100	95,982	
10	Penyelenggaraan Lomba TTG Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	Pelaksanaan lomba TTG Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	0	1	0	100	0	
11	Sosialisasi Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa	Terlaksananya Sosialisasi penerapan SPM (Standar pelayanan Minimal)	Kegiatan	1	91.340.000	1	90.940.000	100	99,56	
16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Pedesaan			391.530.000		389.330.000			
014	Rakor BUMdes se Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksananya Rakor BUMdes se-kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	134.880.000	1	134.880.000	100	100	
015	Monitor dan Evaluasi BUMdes	Pengadaan Monitoring dan Evaluasi disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	154.650.000	1	154.200.000	100	99,71	
017	Sosialisasi Perbub BUMdes No. 31 Tahun 2017	Terlaksananya Sosialisasi Perbub BUMdes No. 31 Tahun 2017	Kegiatan	1	0	1	0	100	0	

018	Pelatihan Manajemen BUMdes	Pelaksanaan Pelatihan BUMdes	Kegiatan	1	102.000.000	1	100.250.000	100	98,28	
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			1.028.870.000		1.028.440.000			
21	Pelatihan BPD Se Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatkan Peran BPD SE-kabupaten Kepulauan Meranti	Kegiatan	1	107.360.000	1	107.360.000	100	100	
23	Pemantapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Desa yang mahir dalam Pengelolaan keuangan dengan SISKEUDES	Kegiatan	1	104.990.000	1	104.990.000	100	100	
24	Pembinaan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa	Melaksanakan Pembinaan dan pemilihan kepala desa/BPD	Kegiatan	1	0	1	0	100	0	
25	Monitoring Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya Monitoring pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kegiatan	1	226.680.000	1	226.680.000	100	100	
27	Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa	Pelaksanaan pelatihan Awal masa jabatan desa	Kegiatan	1	97.360.000	1	97.360.000	100	100	
31	Rakor Penyusunan Penganggaran Desa	Terlaksananya Rakor Penyusunan penganggaran desa	Kegiatan	1	107.000.000	1	107.000.000	100	100	
32	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa sebagai Administrator Desa	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	Kegiatan	1	100.000.000	1	100.000.000	100	100	
33	Workshop Arah dan pedoman Pembangunan Desa	Pelaksanaan Workshop Arah dan pedoman pembangunan Desa	Kegiatan	1	110.000.000	1	110.000.000	100	100	
34	Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaan	Terlaksananya perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	Kegiatan	1	0	1	0	100	0	

35	Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Desa	Terlaksananya Penyusunan naskah akademik pembentukan desa	Kegiatan	1	175.480.000	1	175.050.000	100	99,75	
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Desa			383.000.000		363.827.471			
02	Peningkatan Peran PKK	Pelaksanaan keg PKK	Kegiatan	1	383.000.000	1	363.827.471	100	94,99	
05	Rakor Tokoh Adat Melayu se Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksanya Rakor Tokoh Adat melayu se-abupaten kepulauan meranti	Kegiatan	1	0	1	0	100	0	
Total					3.113.621.171		3.085.555.855			
Rata-Rata Capaian Kinerja								100%	98,94%	

Sumber Data : LKPJ Dinas PMD Tahun 2018

Dari Tabel 3.32 dan Tabel 3.33 diatas tergambar bahwa terdapat perbedaan Capaian Kinerja Program / Kegiatan pada Dinas PMD antara Tahun 2018 dan 2019, dimana dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja untuk tahun 2019 sebesar 87,69 % sementara untuk tahun 2018 sebesar 98,94 %, terdapat selisih diatas sepuluh persen, yaitu 11,25 %, perbedaan ini disebabkan karena perbandingan capaian antara tahun 2018 dan 2019 jika ditelusuri dari segi anggaran di setiap tahunnya.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.901.480.541,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.421.039.446,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,69 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran silpa Rp. 480.441.095,- hal ini dilakukan dalam rangka penghematan dalam penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2019

No	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bersih, efektif dan efisien	1.382.731.000	1.214.441.000	87,82
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah	1.025.244.200	958.791.000	93,51
	Jumlah	2.407.975.200	2.173.232.000	90,66

Sumber Data : Olahan Data Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2019

A. PERMASALAHAN

1. Masih terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga banyak Program yang tidak tercapai dengan optimal.
2. Anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum optimal.
3. Terbatasnya sarana dan Prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. SOLUSI

1. Adanya penambahan aparatur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Peningkatan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti secara signifikan.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan.

C. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder.

D. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti atas upaya penyelenggaraan program dan kegiatan selama Tahun 2019.

Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di Tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Selatpanjang, Februari 2020

KEPALA DPMD
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Drs. IKHWANI, M.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650314 199401 1 001